



**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2017- 2022**



DINAS PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT kami panjatkan atas limpahan rahmat Nya sehingga penyusunan Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 ini dapat diselesaikan.

Rancangan Awal Perubahan Renstra ini disusun dengan mempedomani Draf Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota Payakumbuh dan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kebijakan umum dan operasional lebih lanjut kedalam program dan kegiatan yang terukur dengan target kinerja jelas secara kuantitatif dan kualitatif.

Rancangan Awal Perubahan Renstra Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan komprehensif yang memuat program dan kegiatan pembangunan pada urusan pemerintahan bidang pertanian, kelautan dan perikanan serta disusun dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul serta mengantisipasi perkembangan pembangunan dalam masa lima tahun mendatang. Renstra ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kota Payakumbuh dua tahun kedepan.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi menyumbangkan pikirannya dalam penyusunan Rancangan Renstra ini diucapkan terima kasih. Semoga Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan serta pembangunan pertanian dan perikanan di Kota Payakumbuh dimasa yang akan datang.

Payakumbuh, 27 Agustus 2021
Kepala Dinas Pertanian
Kota Payakumbuh



Ir. DEPI SASTRA

Nip 196501102 198302 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	li
DAFTAR TABEL	lii
DAFTAR GAMBAR	Iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian.....	11
2.2.1. Sumber Daya Manusia.....	11
2.2.2. Aset/Modal.....	12
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian.....	13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian..	24
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	26
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian.....	26
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	27
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	28
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	32
3.5. Penentuan Isu Isu Strategis.....	33
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN	34
4.1. Visi dan Misi Dinas Pertanian.....	34
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian.....	34
BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	36
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..	39
BAB VII. KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN	50
BAB VIII. PENUTUP	54
LAMPIRAN	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Dinas Pertanian Berdasarkan Struktur Tahun 2017	11
Tabel 2.2	Data Pegawai Dinas Pertanian Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2017	11
Tabel 2.3	Data Pegawai Dinas Pertanian Berdasarkan Kepangkatan Tahun 2017	11
Tabel 2.4	Data Pegawai Dinas Pertanian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017	12
Tabel 2.5	Data Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian	12
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kota Payakumbuh	14
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Kota Payakumbuh	17
Tabel 3.1	Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih	28
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	29
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	30
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumbar beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	30
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	31
Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Prop. Sumbar beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	31
Tabel 3.7	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	32
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian	35
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian	37
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	38
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Dinas Pertanian yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	40
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Daerah kegiatan Dinas Pertanian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Pertanian (Perda Kota Payakumbuh No 17 Tahun 2016 dan Perwako no. 93 tahun 2017)	10
----------	--	----

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian memberikan sumbangan yang berarti dalam pembangunan perekonomian Kota Payakumbuh, baik berupa sumbangan langsung seperti dalam sumbangan terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat khususnya petani, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain.

Lebih dalam lagi, sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan ketahanan pangan, pembangunan wilayah, pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, penyedia bahan baku industri, serta menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong pertumbuhan untuk industri hilir yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pertanian melakukan berbagai program yang dapat mendorong peningkatan produksi dan hasil usaha tani dengan menyediakan sarana dan prasarana serta menerapkan sistem agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan meningkatkan daya saing produksi diperdagangan bebas. Kondisi sumber daya lahan, agroklimat dan sumber daya manusia merupakan faktor penentu yang perlu dipertimbangkan dalam menunjang pengembangan kegiatan Pertanian dan Perikanan sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian Kota Payakumbuh.

Ketersediaan sumber daya lahan yang subur di Kota Payakumbuh yang didukung oleh sumberdaya agroklimat serta ketersediaan sumberdaya manusia pertanian merupakan faktor pendukung dalam kegiatan pertanian dan perikanan sebagai salah satu pilar ekonomi.

Untuk mewujudkan harapan pertanian menjadi pilar ekonomi di Kota Payakumbuh, maka fokus utama pembangunan pertanian perlu diarahkan kepada upaya pemenuhan kebutuhan pangan. Pembangunan pertanian tidak hanya ditekankan pada aspek produksi, tetapi harus berkualitas, efisien dan berdaya saing, berkelanjutan, serta berorientasi pasar. Dengan demikian diharapkan akan mampu meningkatkan produksi sesuai kebutuhan, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta dapat mengantisipasi tantangan dan peluang era globalisasi.

Dengan demikian, pembangunan pertanian tidak hanya ditekankan pada aspek produksi, tetapi harus berkualitas, efisien dan berdaya saing, berkelanjutan, serta berorientasi pasar. Dengan demikian diharapkan akan mampu meningkatkan produksi sesuai kebutuhan, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta dapat mengantisipasi tantangan dan peluang era globalisasi. Ditengah semangat untuk mewujudkan pertanian dan perikanan sebagai pilar ekonomi, diprediksi 5 tahun kedepan menjadi tahun yang cukup berat untuk mewujudkannya. Faktor iklim global yang tidak menentu berdampak pada sektor pertanian dan perikanan di Kota Payakumbuh.

Kekeringan dalam waktu yang lama menyebabkan menurunnya produksi dan produktivitas sektor pertanian dan perikanan disamping itu pemotongan anggaran dari pemerintah mengakibatkan tidak terlaksana beberapa kegiatan pembangunan pertanian yang sudah direncanakan.

Dengan adanya Perubahan Refisi RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022, maka Dinas Pertanian juga harus menetapkan Refisi Renstra untuk menjamin keselarasan dan sinergitas dokumen perencanaan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2225 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Kerja Pemerintah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018, tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pertanian Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 adalah untuk :

- Memberikan gambaran yang jelas tentang rencana program/kegiatan lima tahunan Dinas Pertanian Kota Payakumbuh termasuk arah sasaran strategi dan arah kebijakan dan menyesuaikan dengan Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;
- Merumuskan tolok ukur yang lebih jelas dalam pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Pertanian dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi;
- Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar program dan kegiatan pembangunan Dinas Pertanian dengan Perubahan RPJMD.
- Menyesuaikan capaian relaisasi Kinerja dengan realisasi yang ada di lapangan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pertanian Kota Payakumbuh tahun 2017–2022 bertujuan untuk:

- Terwujudnya sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan antara pemerintah, pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Payakumbuh;
- Terciptanya konsistensi pelaksanaan program pembangunan antara RPJMD Kota Payakumbuh dengan Dinas Pertanian Sebagai pedoman dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan Dinas Pertanian Kota Payakumbuh setiap tahunnya;
- Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan mengukur kinerja Dinas Pertanian Kota Payakumbuh tahun 2017–2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II : Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian Kota Payakumbuh
Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pertanian, Sumberdaya Dinas Pertanian; Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian
- BAB III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pertanian; Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh; Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Penentuan Isu-Isu Strategis.

- BAB IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
Memuat Visi dan Misi Dinas Pertanian; Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah Dinas Pertanian; Strategi dan Kebijakan
Dinas Pertanian.
- BAB V : Strategis dan Arah Kebijakan.
Memuat strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian untuk lima
tahun kedepan.
- BAB VI : Rencana Program Dan Kegiatan serta Pendanaan.
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
- BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.
Memuat indikator kinerja Dinas Pertanian yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pertanian lima
tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran RPJMD
- BAB VII : Penutup.
Lampiran (Elemen SAKIP)

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pertanian Kota Payakumbuh dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh nomor Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tersebut.

Tugas pokok Dinas Pertanian adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonom dan melaksanakan tugas-tugas perbantuan bidang pertanian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pertanian Kota Payakumbuh mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian/perikanan penyelenggaraan unsur pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian/perikanan.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian/perikanan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kepala Dinas Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang perikanan;
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang perikanan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang pertanian dan perikanan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diatas, Sekretariat di bantu oleh Subbag Umum dan Kepegawaian, Subbag Program dan Keuangan.

c. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Sarana dan Prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Sarana dan Prasarana;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sarana dan Prasarana;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diatas, Bidang Sarana dan Prasarana dibantu oleh Seksi Lahan dan Irigasi, Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat dan Mesin, Seksi Investasi dan Pembiayaan.

d. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diatas, Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dibantu oleh Seksi Produksi, Seksi Perlindungan Tanaman, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk menjalankan tugas pokok di atas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- f. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu oleh Seksi Produksi, Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil peternakan.

f. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan. Untuk menjalankan tugas pokok di atas Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Perikanan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Perikanan;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bidang Perikanan;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Perikanan dibantu oleh Seksi Produksi, Seksi Perbenihan dan Pakan, Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

g. Bidang Penyuluhan

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Penyuluhan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Penyuluhan;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bidang Penyuluhan;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bidang Penyuluhan dibantu oleh Seksi Kelembagaan, Seksi Sumber Daya Manusia dan Ketenagaan, Seksi Metodologi dan Informasi.

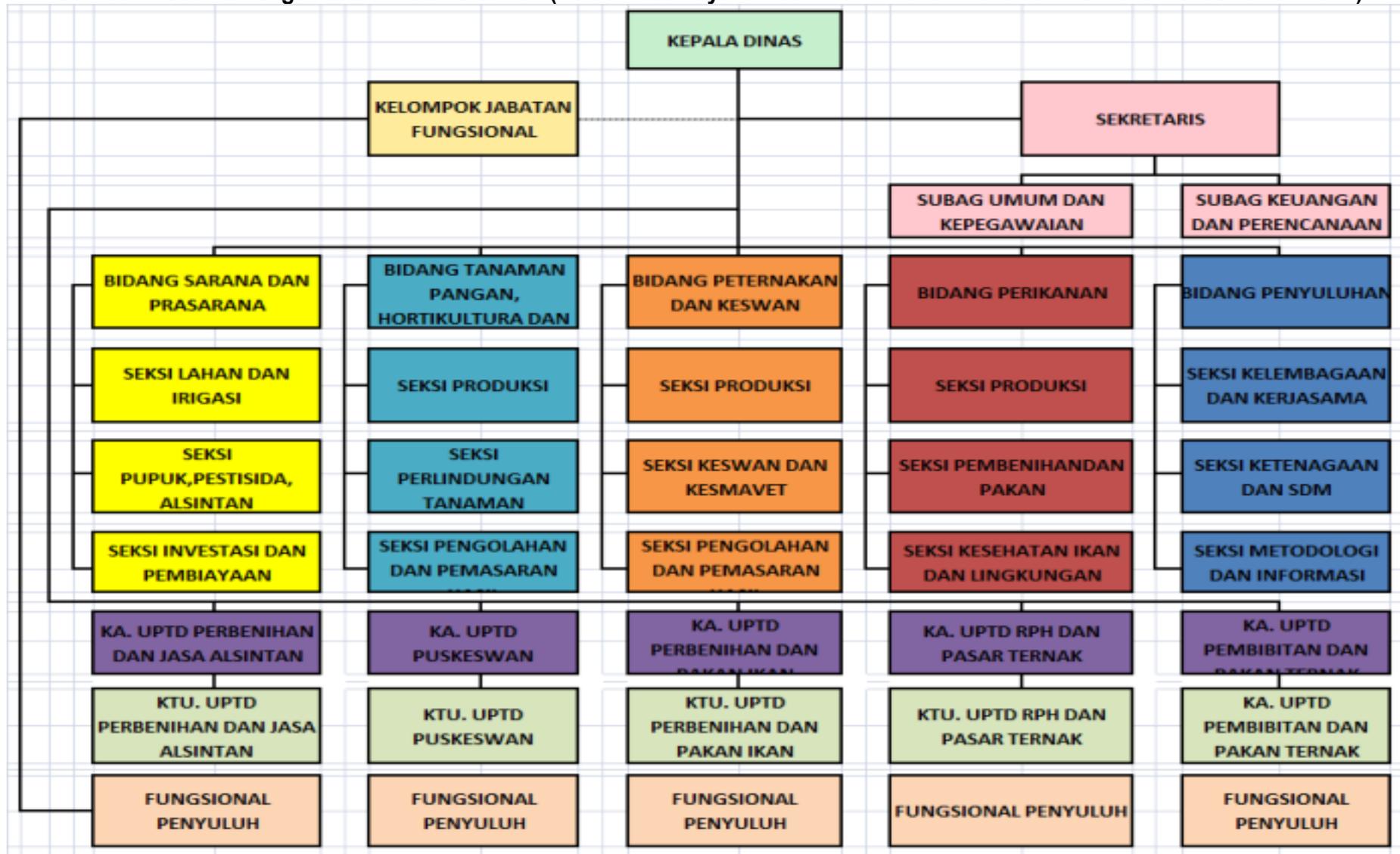
h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

UPTD menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pertanian dalam rangka menunjang program teknis Dinas diantaranya UPTD Perbenihan dan jasa alsintan, UPTD Puskesmas, UPTD perbenihan dan pakan ikan, UPTD RPH dan Pasar Ternak serta UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak.

i. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan terutama Fungsional Penyuluh, mulai dari fungsional penyuluh kota sampai wilayah binaan (kelurahan).

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian (Perda Kota Payakumbuh No 17 Tahun 2016 dan Perwako No. 93 Tahun 2017)



2.2 Sumber Daya Dinas Pertanian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian didukung oleh sumber daya aparatur yang terdiri dari :

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Tabel 2.1.
Data Pegawai Dinas Pertanian Berdasarkan Struktur Tahun 2020

Uraian	Jumlah (Orang)
Eselon II.b	1
Eselon III.a	1
Eselon III.b	5
Eselon IV.a	22
Eselon IV.b	5
Fungsional Tertentu	34
Pelaksana	19
THL TB PP	19
Penyuluh Perikanan Bantu	1
THL Umum	46
Jumlah	153

Tabel 2.2.
Data Pegawai Dinas Pertanian Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2020

Uraian	Jumlah
PNS	87
THL	66
Jumlah	153

Tabel 2.3.
Data Pegawai Dinas Pertanian Berdasarkan Kepangkatan Tahun 2020

Uraian	Jumlah (Orang)
Pembina Utama Muda / IV.c	2
Pembina Tk. I / IV.b	6
Pembina / IV.a	12
Penata Tk. I / III.d	20
Penata / III.c	16
Penata Muda Tk.I / III.b	7
Penata Muda / III.a	7
Pengatur Tk. I / II.d	5
Pengatur / II.c	5
Pengatur Muda Tk.1 / II.b	1
Pengatur Muda / II.a	5
Juru Muda / I.a	2
Jumlah	87

Tabel 2.4.
Data Pegawai Dinas Pertanian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

Uraian	Jumlah (Orang)
S2	5
S1 / D.IV	57
DIII	4
SMA	21
Jumlah	87

2.2.2 Aset/Modal

Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Data Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian

No	Uraian	Jumlah (Unit)
1	Bangunan kantor	8
2	Kendaraan Roda Empat	11
3	Kendaraan Roda Dua	110
4	Mesin absensi	1
5	Genset	1
6	Handycam	1
7	Filling Kabinet	3
8	Lemari	6
9	Wireles	1
10	Alat Pendingin / AC	1
11	Alat ubinan	1
12	Alat pengukur Ph tanah	25
13	Mesin Tik	4
14	Brankas	1
15	Meja	1
16	Kursi tamu	3
17	Sofa	6
18	Meja staf	46
19	Meja rapat	28
20	Kursi tunggu	1
21	Meja komputer	1
22	Meja Biro	2
23	Meja ½ Biro	14
24	Meja Kerja	15
25	Meja Kerja ½ Biro	5
26	Televisi	1
27	UPS	5
28	Kamera digital	6
29	Kamera	3
30	Tipe Compo DVD	1
31	Komputer	22
32	Laptop	6

33	Notebook	10
34	Printer	23
35	LCD Projector	2
36	Proyektor	8
37	Infokus mini	6
38	Faximile	3
39	Generator	1
40	TA	1

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kota Payakumbuh pada tahun 2013-2016 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel. 2.6 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kota Payakumbuh

No	Komoditas	satuan	Target indikator kinerja				Realisasi capaian indicator kinerja				Rasio Capaian %				Ket
			2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	
1	Produksi Padi	Ton	29.515	30.517	31.689	34.500	33.123	33.424	35.948	37.402	112,2	109,5	105,73	108,4	IKU
2	Produksi Cabe	Ton	369	372	381	980	236,9	370,5	390,9	973,9	64,2	99,5	105,51	99,3	IKU
3	Produksi Kakao	Ton	924	937	950	1095	919,6	937,3	967,5	1092,0	99,5	100	103,22	99,7	IKU
4	Populasi Sapi	Ekor	5200	5.300	5525	5620	4075	5522	5673	5536	78,3	104,1	102,6	98,5	IKU
5	Produksi Ikan Konsumsi	Ton	420	510	575	482,25	436,4	485,74	512,35	433,27	103,9	95,24	89,1	89,8	IKU

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kota Payakumbuh

Pemerintahan dan Itas Pembangunan	Capaian Realisasi Keuangan Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh															
	Target (Rp)					Realisasi (Rp)					Rasio Capaian (%)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	
URUSAN PERTANIAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																
I	Program pelayanan administrasi perkantoran															
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,950,000	1,950,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,728,000	1,728,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	88.62	88.62	100.00	100.00	100.00
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	128,000,000	128,000,000	93,000,000	107,470,000	135,680,000	114,708,014	114,708,014	76,894,751	91,719,586	87,857,874	89.61	89.61	82.47	85.34	84.64
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	18,235,000	18,235,000	8,812,000	9,019,800	10,512,000	8,829,700	8,829,700	5,432,150	5796500	6,407,100	48.42	48.42	67.80	64.15	60.95
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	131,748,000	131,748,000	133,000,000	142,788,000	136,770,000	131,748,000	131,748,000	187,898,000	116,988,000	112,393,000	100.00	100.00	81.12	81.93	82.18
5	Penyediaan Peralatan kebersihan kantor	3,889,000	3,889,000	3,800,100	2,256,850	5,083,100	1,827,500	1,827,500	2,999,800	2,219,500	5,839,800	49.81	49.81	99.99	98.35	99.54
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9,168,000	9,168,000	2,878,000	5,600,000	9,000,000	2,156,000	2,156,000	2,878,000	4,391,000	6,955,000	23.52	23.52	100.00	87.82	87.28
7	Penyediaan alat tulis kantor	21,584,000	21,584,000	14,999,500	31,875,600	25,782,588	16,882,500	16,882,500	14,999,500	20,636,480	25,960,725	74.51	74.51	100.00	89.82	97.20
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24,412,100	24,412,100	10,800,000	18,000,000	11,900,000	18,737,800	18,737,800	9,878,400	9,796,000	19,983,750	78.76	78.76	99.78	97.88	99.85
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,969,500	3,969,500	14,999,500	2,597,000	5,335,000	2,898,500	2,898,500	12,814,950	2,528,000	5,335,000	94.43	94.43	85.44	87.84	100.00
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7,900,000	7,900,000	32,197,200	26,488,800	82,900,000	5,470,909	5,478,909	31,455,000	23,198,000	50,822,500	78.16	78.16	97.89	87.84	97.74
11	penyediaan bahan baku dan peralatan perundangan	4,880,000	4,880,000	4,880,000	4,880,000	4,832,000	4,320,000	4,320,000	4,250,000	4,500,000	4,500,000	92.31	92.31	90.81	96.15	97.15
12	Penyediaan makanan dan minuman	14,700,000	14,700,000	15,900,000	14,914,800	13,500,000	14,355,000	14,355,000	14,965,750	13,490,500	13,490,500	97.65	97.65	#VALUE!	99.94	99.93
13	Rapat rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah	147,040,000	147,040,000	183,770,000	159,998,000	414,333,750	134,850,400	134,850,400	182,874,990	158,378,433	413,106,488	91.57	91.57	99.14	98.99	99.70
14	Penyediaan tenaga Administrasi dan teknis perkantoran	40,950,000	40,950,000	16,200,000	38,785,816	43,702,588	40,950,000	40,950,000	15,120,000	38,503,280	42180248	100.00	100.00	93.33	96.78	96.47
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur															
15	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	-	-	-	-	121,480,480	-	-	-	-	121,480,000	-	-	-	-	100.00
16	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	-	-	-	38,000,000	-	-	-	-	38,880,000	-	-	-	-	99.84	-
17	Pemeliharaan rutin berkala gedung Kantor	22,407,500	22,407,500	10,330,800	8,000,000	26,890,600	22,407,500	22,407,500	4,781,000	5,803,000	18,232,804	100.00	100.00	48.99	96.72	87.88
18	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	483,189,900	483,189,900	279,996,000	275,010,400	282,498,500	485,459,350	485,459,350	224,423,298	289,899,908	212,528,455	83.91	83.91	80.15	78.32	84.17
III	Program peningkatan disiplin aparatur															
19	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	72,700,000	72,700,000	33,900,000	33,998,000	11,840,000	72,068,000	72,068,000	33,727,500	32,577,000	19,820,000	99.13	99.13	99.49	95.84	93.81
IV	Program Perencanaan pembangunan daerah															
20	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Pelayanan Publik	-	-	-	-	15,806,000	-	-	-	-	11,480,000	-	-	-	-	78.37
V	Perencanaan pembangunan bidang ekonomi															
21	Penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi daerah	-	-	215,259,000.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi daerah	-	-	215,259,000	-	-	-	-	195,278,000	-	-	-	-	90.72	-	-
VI	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan															
22	Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan	-	-	58,789,910	-	-	-	-	40,844,800	-	-	-	-	70.51	-	-
23	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Analisis Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	14,998,000	-	-	-	-	14,800,000	-	-	-	-	98.68

	PERTAMAN																
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani																
V8																	
24	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	505,083,194	505,083,194	151,199,800	105,432,800	78,076,200	246,837,200	246,837,200	126,494,800	104,815,477	76,795,200	48.07	48.07	83.60	99.42	98.36	
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan																#DIV/0!
V8																	
25	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	85,771,500	85,771,500	44,837,500	45,629,800	26,997,900	61,267,500	61,267,500	43,791,300	41,648,300	26,607,000	71.43	71.43	97.67	99.86	99.78	
26	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	198,600,000	198,600,000	66,847,300	26,178,800	51,891,500	162,455,000	162,455,000	65,357,800	21,579,273	51,965,500	94.34	94.34	98.07	78.59	98.98	
27	Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/ Perkebunan	-	-	34,545,250	12,690,800	38,658,100	-	-	33,902,750	12346800	39,655,300	-	-	98.14	97.29	99.99	
	Prog. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak																
	Kegiatan :																
28	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	147,449,300	147,449,300	124,623,200	118,488,800	261,220,800	114,917,000	114,917,000	118,640,670	114,002,950	251,180,040	77.94	77.94	95.20	96.28	96.16	
29	Pemasnahan ternak yang terjeangit penyakit endemik	29,320,940	29,320,940	24,600,000	54,567,600	62,915,300	28,760,100	28,760,100	22,150,000	54,196,600	54,268,900	99.07	99.07	90.04	99.31	87.51	
30	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	-	-	8,426,250	8,417,750	19,805,000	-	-	8,396,500	6,236,500	7,329,750	-	-	99.65	97.88	67.84	
31	Pendataan Masalah Peternakan.	-	-	42,250,000	46,212,900	86,581,000	-	-	39,238,800	44,083,780	84,471,999	-	-	92.85	95.39	97.58	
32	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan. (DAK)	-	-	-	661,354,800	266,714,900	-	-	-	605,623,418	214,903,000	-	-	-	91.57	80.57	
	Prog Peningkatan Produkasi Hasil Ternak																
	Kegiatan :																
33	Pendistribuan Ternak kepada masyarakat	282,434,457	282,434,457	223,801,500	-	19,220,000	141,133,150	141,133,150	-	-	18,633,500	49.97	49.97	-	-	96.95	
34	Pembibitan dan perawatan ternak	137,849,875	137,849,875	146,474,000	163,178,800	111018000	90,133,600	90,133,600	138,831,800	158,956,480	184,580,000	65.39	65.39	94.24	97.41	93.51	
35	Penyuluhan kualita gizi dan pakan ternak	-	-	32,711,000	-	-	-	-	26,804,500	-	-	-	-	81.94	-	-	
36	Pembangunan Sarana dan prasarana pembibitan ternak	335,639,522	335,639,522	533,948,950	418,756,100	396,250,000	288,976,750	288,976,750	523,136,350	487,711,418	385,834,000	86.10	86.10	95.14	97.36	99.69	
37	Pembinaan dan Pengembangan Peternak	-	-	-	-	236,637,000	-	-	-	-	227,673,948	-	-	-	-	96.21	
	Prog Peningkatan Pemasaran hasil Produkasi Peternakan																
	Kegiatan :																
38	Pembangunan Sarana dan prasarana pasar produkasi hasil peternakan	657,999,963	657,999,963	483,391,800	1,341,998,510	268,637,900	661,914,490	661,914,490	454,202,450	1,195,753,960	282,348,950	77.23	77.23	93.96	82.48	97.03	
39	Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana pasar produkasi hasil peternakan	142,652,330	142,652,330	181,356,500	205,418,190	282,622,900	138,164,750	138,164,750	172,975,400	187,604,600	278,562,000	97.56	97.56	95.38	91.33	95.38	
40	Promosi atas hasil produkasi peternakan unggulan daerah	46,999,960	46,999,960	88,190,500	84,134,800	161,293,500	34,715,300	34,715,300	81,382,500	83,858,780	153,763,500	73.86	73.86	92.28	99.67	95.33	
41	Pengembangan agribisnis peternakan	-	-	19,823,500	21,928,800	18,885,300	-	-	19,185,200	20,819,500	18,762,575	-	-	96.76	94.94	99.78	
42	Penyediaan sarana dan prasarana RPH-R	-	-	-	-	273,286,000	-	-	-	-	263,951,000	-	-	-	-	96.58	
43	Pembinaan dan Pengembangan Peternak	-	-	-	-	236,637,000	-	-	-	-	227,673,948	-	-	-	-	96.21	
44	Rehabilitasi dan Penyediaan sarana pendukung RPH-U	-	-	820,551,000	-	-	-	-	738,949,500	-	-	-	-	89.08	-	-	
45	fasilitasi kerjasama regional / internasional penyediaan hasil produkasi	-	-	43,049,500	-	28,415,000	-	-	32,944,073	-	28,621,750	-	-	76.53	-	97.30	
	KELAUTAN DAN PERIKANAN																
	Prog. Optimalisasi Pengolahan dan pemasaran produkasi																
33																	
	Kegiatan :																
46	Pengembangan Pengolahan hasil Perikanan	-	-	76,179,500	536,680,800	64,970,000	-	-	89,504,400	491,217,000	64,814,000	-	-	91.24	92.56	99.76	

47	Pelatihan petani dan petaku agribisnis	-	-	33,644,150	15,848,800	47,870,000	-	-	-	15,415,500	47,587,750	-	-	-	97.85	99.10	
X8	PROG. PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN																
48	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	468,946,000	468,946,000	195,192,500	-	14,149,900	436,460,000	436,460,000	192,470,700	-	12,996,000	93.07	93.07	98.61	-	95.42	
49	Pengembangan Bibit ikan Unggul	1,694,309,500	1,694,309,500	968,209,250		970,726,250	1,596,148,000	756,644,600	756,644,600	691,551,950	873,006,514	1,273,943,900	44.66	44.66	95.17	89.93	79.01
50	Perencanaan Pengadaan Tanah	-	-	-		12,015,800	-	-	-	-	6,881,600	-	-	-	57.27	-	
51	Peralapan Pengadaan Tanah	-	-	-		30,923,800	-	-	-	-	27,801,500	-	-	-	90.16	-	
52	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	-	-	-		534,400,000	-	-	-	-	534,400,000	-	-	-	100.00	-	
53	Penyerahan hasil Pengadaan Tanah	-	-	-		13,000,000	-	-	-	-	13,000,000	-	-	-	100.00	-	
54	Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	26,864,750	26,864,750	47,239,950		32,466,600	23,487,900	19,470,750	19,470,750	42,693,950	30,696,600	23,307,000	72.48	72.48	90.38	94.55	99.32
V8	Optimalisasi Sarana dan Prasarana UPTD Perbenihan dan Pakan Ikan	-	-	-		463,917,800	172,148,800	-	-	-	391,779,600	168,936,000	-	-	-	84.45	97.61
55	Pendampingan pada Kelompok Pembudidaya Ikan	-	-	43,520,000		23,674,800	16,616,750	-	-	37,695,750	19,663,000	15,970,750	-	-	86.41	83.06	99.76
XIV	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAM BUDIDAYA PERIKANAN AIR LAUT, PAYAU DAN AIR TAWAR																
56	Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar	1,117,390,000	1,117,390,000	1,340,486,000		1,150,613,000	-	1,163,375,000	1,103,375,000	-	1,628,966,600	-	96.75	96.75	-	89.38	-
57	Penyediaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan air tawar	-	-	137,800,000		-	-	-	-	122,530,500	-	-	-	-	89.44	-	-
XV	Program Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan																
	Kegiatan:																
58	Kajian Saliem Penyuluh Perikanan	235,350,000	235,350,000	294,973,000			189,813,750	221,256,361	221,256,361	200,860,300	-	188,709,600.00	94.01	94.01	97.60	-	99.67
59	Penyuluhan Gemarikan	-	-	-		57,977,800	82,247,000	-	-	-	57,772,450	82,207,000.00	-	-	-	99.65	99.95
60	Peningkatan SDM Penyuluh dan Kelompok Pembudidaya Ikan	-	-	-		141,625,800	96,750,000	-	-	-	136,136,900	90,583,850	-	-	-	96.13	99.82
		7,356,061,057	7,356,061,057	7,320,550,918		8,204,641,576	6,475,639,620	5,445,876,724	5,445,876,724	5,088,835,082	7,385,623,985	5,067,897,138	74.03	74.03	89.41	98.62	90.60

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Kota Payakumbuh

a. Dinas Perikanan dan Peternakan

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara realisasi dan Anggaran pada tahun ke-				Rata-rata pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah - Restribusi Daerah - Lain-lain PAD yang sah	Data ditampilkan sebagai Dinas Pertanian	845,0	508,6		Data ditampilkan sebagai Dinas Pertanian	1.384,4	494,2		Data ditampilkan sebagai Dinas Pertanian	163,8 %	97,2 %		(-39,8 %)	(-64,3 %)	
BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal	Data ditampilkan sebagai Dinas Pertanian	10.789,5 <u>3.898,7</u> <u>6.891,0</u> 800,7 4228,5 1.861,	12.443,4 <u>4.149,1</u> <u>8.294,2</u> 729,6 2.184,5 5.380,0		Data ditampilkan sebagai Dinas Pertanian	9.661,2 <u>3.457,2</u> <u>6.204,0</u> 713,4 3.770,5 1.720,	11.335,4 <u>3.949,9</u> <u>7.385,5</u> 685,9 1.968,0 4.731,6		Data ditampilkan sebagai Dinas Pertanian	89,5 % <u>88,7 %</u> <u>90,0 %</u> 89,1 % 89,2 % 92,4 %	91,1 % <u>95,2 %</u> <u>89,0 %</u> 94,0 % 90,1 % 87,9 %		15,32 %	17,32 %	

Ket :Anggaran dalam juta Rupiah

b. Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Capaian Realisasi Keuangan Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Payakumbuh												
	Target (Rp)				Realisasi (Rp)				Rasio Capaian (%)				
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	
URUSAN PERTANIAN													
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1.950.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.728.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	88,61	100	100	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	128.008.800	90.500.000	64.800.000	53.550.000	114.708.014	54.504.354	51.022.425	47.621.259	89,61	60,27	78,74	88,92
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	18.235.000	10.630.000	13.250.000	11.299.000	8.829.700	77.821.500	8.695.950	9.197450	48,42	73,58	64,95	81,40
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	131.748.000	133.308.000	130.578.000	133.503.000	131.748.000	131.558.000	129.763.000	133.398.000	100	98,69	99,30	99,92
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.669.000	2.996.640	2.996.640	2.965.000	1.827.500	2830.600	2.943.000	2.658.300	48,81	94,46	98,21	89,65
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.168.000	2.678.000	3.178.000	3.178.000	2.156.000	2.482.000	3.178.000	3.115.000	23,52	92,68	100	98,01
7	Penyediaan alat tulis kantor	21.584.000	14.999.500	16.061.500	18.799.000	16.082.500	14.978.500	16.061.500	18.781.500	74,51	99,86	100	99,90
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.412.100	10.216.000	9.999.900	11.532.000	18.737.800	7.893.400	9.995.900	11.432.000	79,76	78,15	99,96	99,13
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3.069.500	1.999.500	1.999.500	2.997.000	2.898.500	1.972.000	1.897.000	2.767.700	94,43	98,62	94,87	92,35
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7.000.000	79.247.200	9.901.900	75.821.500	5.470.909	74.822.600	9.901.900	60.180.000	78,16	94,42	100	79,37

12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.680.000	4.680.000	4.680.000	9.990.000	4.320.000	4.500.000	4.500.000	8.582.000	92,31	96,15	96,15	85,90
13	Penyediaan makanan dan minuman	14.700.000	14.997.000	14.997.000	12.172.500	14.355.000	13.229.750	13.743.450	11.809.600	97,65	88,22	91,64	97,02
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	147.040.000	109.190.000	100.918.000	267.648.000	134.650.400	108.544.980	100.147.320	266.810.985	91,57	99,41	99,24	99,69
15	Penyediaan jasa tenaga adm/teknik perkantoran	40.950.000	32.400.000	153.763.120	84.759.030	40.950.000	14.535.000	140.999.600	71.745.360	100	44,86	91,709	84,65
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	8.100.000	-	-	-	8.100.000	-	-	-	100	-
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	22.407.500	4.700.000	5.500.000	14.000.000	22.407.000	4.514.100	5.450.000	13.250.000	100	96,04	99,10	94,64
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	483.189.900	287.569.447	215.133.100	210.905.200	405.459.350	254.318.129	188.405.323	191.458.944	83,91	88,44	87,58	90,77
Program Peningkatan disiplin Aparatur													
1	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	72.700.000	45.492.000	53.625.000	-	72.068.000	45.146.000	51.326.400	-	99,13	99,24	95,71	-
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani													
1	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	-	50.000.000	29.754.000	45.662.000	-	46.122.000	29.754.000	31.147.500	-	92,24	100	68,21
2	Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani	505.083.194	365.115.580	345.728.000	228.729.000	258.245.994	345.261.900	249.150.900	227.199.000	51,13	94,56	72,07	11,89
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan													
1	Perencanaan pengadaan tanah TA	245.797.000	68.807.600	-	-	214.013.150	27.078.250	-	-	87,07	39,39	-	-

2	Persiapan pengadaan tanah TA	33.539.500	-	-	-	5.438.000	-	-		16,21	-	-	
3	Pelaksanaan Pengadaan Tanah TA	696.685.000	-	-	-	684.580.000	-	-		98,26	-	-	
4	Penyerahan hasil tanah TA	1.200.000	-	-	-	1.200.000	-	-		100	-	-	
5	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan unggul daerah	-	107.050.000	-	-	-	96.470.000	-		-	99,11	-	
6	Operasional Terminal Agribisnis	-	1.579.602.500	-	-	-	1.516.550.556	-		-	96,01	-	
7	Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	-	-	35.961.700	21.578.000	-	-	34.959.250	20.371.050	-	-	97,21	94.40
8.	Fasilitas kerjasama regional, nasional/internasional penyediaan hasil produk pertanian/perkebunan komplementer	-	-	116.551.000	33.752.000	-	-	94.384.000	32.042.400	-	-	80,98	94.93
9	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan	-	48.346.650	216.609.000	-	-	42.436.500	208.040.620		-	87,77	96,05	
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan													
1	Pengadaan Sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan tepat guna	-	190.898.000	-	283.835.800	-	185.882.900	-		-	97,77	-	
2	Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	-	34.221.400	24.808.400	24.616.600	-	21.345.000	22.278.500	23.286.600	-	62,37	89,80	94.59
3	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/perkebunan tepat guna	136.596.515	225.207.000	284.286.400	225.555.000	116.197.250	212.146.000	252.857.550	205.627.900	85,07	94,20	88,94	91.17

4	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi tanaman pangan hortikultura	-	-	213.338.000	-	-	-	204.413.500	-	-	95,82		
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan													
1	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan (DAK)	3.775.120.566	2.271.723.500	4.877.018.000	4.109.232.496	2.714.486.635	1.847.024.359	3.766.879.200	3.809.860.500	71,90	81,30	77,24	92,71
2	Penyuluhan Peningkatan produksi pertanian perkebunan	-	65.614.000	-	-	-	62.184.150	-	-	-	94,77	-	
3	Pengembangan bibit unggul pertanian perkebunan	145.995.000	349.845.000	341.089.500	101.049.500	97.365.000	329.988.760	315.421.500	89.702.500	66,39	94,32	92,47	88,77
4	Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian	-	15.459.000	-	-	-	11.054.650	-	-	-	71,51	-	
5	Monitoring evaluasi dan pelaporan	6.401.924	-	-	-	3.361.800	-	-	-	52,51	-	-	
6	Pengadaan sarana prasarana teknologi pertanian perkebunan tepat guna	89.750.000	81.107.350	87.151.000	283.835.800	85.039.960	75.716.850	76.033.050	149.058.760	94,75	93,35	87,24	52,52
7	Pengembangan pembenihan / pembibitan	194.356.891	-	-	-	86.678.115	-	-	-	44,60	-	-	
8	Pengendalian Hama dan Penyakit Pada Tanaman Pertanian/Perkebunan	39.338.800	-	70.661.300	60.181.300	36.201.200	-	69.049.600	59.195.000	92,02	-	97,72	98,36
9	Gemas (Gerakan Masal) Pemangkasan Kakao	50.712.700	-	41.570.000	-	32.595.000	-	40.209.000	-	64,27	-	96,37	
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan													
1	Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	85.771.500	274.689.500	68.530.700	192.159.100	61.267.500	243.835.250	64.689.550	177.509.500	71,43	88,77	94,39	92,38
2	Peningkatan Kesejahteraan penyuluh pertanian/perkebunan	108.600.000	94.878.600	-	82.262.000	102.455.000	87.457.645	-	77.177.000	94,34	92,18	-	93,82

3	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	-	40.145.400	-	117.953.700	-	33.750.200	-	115.552.500	-	84,07	-	97,96
4	Peningkatan teknologi penyuluh pertanian/perkebunan	-	-	381.986.000	86.325.500	-	-	363.960.375	74.821.500	-	-	95,28	86,67]
5	Peningkatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian	-	-	1.124.315.900	-	-	-	1.114.825.400	-	-	-	99,16	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan													
1	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	52.281.750	22.121.000	35.159.000	-	36.187.150	15.244.500	29.463.850	-	69,22	68,91	83,08	
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	36.001.970	49.135.050	36.050.000	75.172.400	23.342.450	40.171.150	34.940.950	63.765.850	64,84	81,76	96,92	84,83
3	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	-	332.900.500	140.231.000	68.757.000	-	318.014.100	94.558.600	61.427.500	-	95,53	67,43	89,34
4	Peningkatan produksi , produktifitas dan mutu produk perkebunan , produk pertanian	-	-	154.247.000	159.992.820	-	-	134.043.500	142.100.350	-	-	86,90	88,82
5	Data Base / Pemetaan tanaman pangan hortikultura	-	-	25.901.000	59.306.000	-	-	23.153.000	54.879.000	-	-	89,38	92,54
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan													
1	Pengembangan hasil pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan	-	43.917.000	48.378.600	32.656.000	-	39.792.700	43.637.000	-	-	90,61	94,09	
2	Pengembangan hasil hutan non kayu	-	28.588.500	30.825.200	89.834.500	-	25.331.900	26.817.900	-	-	88,61	87,00	
3	Monitoring evaluasi dan pelaporan(perkebunan dan kehutanan)	6.402.400	10.002.400	-	-	3.361.800	9.932.400	-	-	52,51	99,30	-	
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan													

1	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	37.679.500	94.704.500	-	-	36.123.500	87.768.000	-		95,87	92,68	-	
2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	-	105.239.000	-	-	-	68.334.350	-		-	64,93	-	
Program Perencanaan dan pengembangan hutan													
1	Penhijauan Kota/turus Jalan	66.784.500	-	-	-	60.360.000	-	-		90,38	-	-	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian

Berdasarkan rencana strategis kementerian yang terkait dengan Dinas Pertanian Kota Payakumbuh yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta rencana strategis dinas terkait di tingkat Provinsi Sumatera Barat maka beberapa peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pertanian antara lain peningkatan produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

Pengembangan produksi didorong dengan bantuan sarana dan prasarana baik berupa hibah dari pemerintah pusat maupun bantuan melalui APBD Provinsi maupun dari Kementerian Pertanian dalam bentuk bantuan Alsintan, Penggunaan benih dan bibit unggul merupakan salah satu pendorong peningkatan produksi.

Peluang peningkatan bidang pertanian di Kota Payakumbuh didukung oleh letak Kota Payakumbuh yang strategis di perlintasan memasuki Provinsi Riau. Hal ini akan meningkatkan peluang pasar produk pertanian. Sementara itu tantangan terhadap peningkatan produksi pertanian di Kota Payakumbuh adalah tingginya alih fungsi lahan untuk non pertanian seperti pemukiman, toko, jalan dan fasilitas umum lainnya. Tantangan selanjutnya adalah tingginya fluktuasi harga komoditi pertanian terutama tanaman hortikultura, semakin tingginya biaya produksi pertanian terutama pembelian pestisida dan semakin menurunnya jumlah petani akibat dari kurangnya minat kalangan muda untuk menjadi petani.

Tantangan sekaligus dapat dijadikan peluang dalam pengembangan pertanian yaitu dengan adanya perguruan tinggi bidang pertanian di Kota Payakumbuh dan daerah tetangga untuk menunjang teknologi dan SDM petugas dan petani.

Peningkatan produksi daging konsumsi melalui peningkatan populasi ternak merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk program/kegiatan yang mendukung peningkatan populasi ternak. Dengan dukungan sumber daya yang tersedia (lahan dan pakan hijauan) maka peluang tersebut dapat dimanfaatkan di Kota Payakumbuh.

Tantangan sekaligus dapat dijadikan peluang dalam pengembangan peternakan yaitu dengan dibangunnya Rumah Potong Hewan Ruminansia Modern (RPHR-M) di Kota Payakumbuh dalam bentuk produk daging beku dengan segmen pasar yang berbeda dengan Rumah Potong Hewan tradisional yang ada sekarang ini. Hal ini akan meningkatkan permintaan ternak siap potong dimana dengan populasi dan kondisi saat ini masih jauh dari cukup. Untuk itu peningkatan populasi dan peningkatan pelayanan di sektor hilir seperti pasar ternak akan ditantang untuk dapat melayani kebutuhan yang semakin meningkat, oleh sebab itu perlu dilaksanakan peningkatan pelayanan berupa sarana dan prasarana.

Demikian juga pada disektor perikanan prioritas peningkatan pendapatan dari usaha ini mendapat prioritas utama. Dengan keadaan Kota Payakumbuh sebagai daerah perkotaan, maka intensifikasi melalui peningkatan mutu bibit dan penyediaan pakan bermutu dengan harga murah merupakan peluang yang akan dikembangkan dalam tahun mendatang.

Berdasarkan rencana strategis kementerian yang terkait dengan Dinas Pertanian Kota Payakumbuh yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan serta rencana strategis dinas terkait di tingkat Provinsi Sumatera Barat maka beberapa peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pertanian antara lain peningkatan bibit ikan dan produksi pakan berkualitas dengan harga terjangkau.

Produksi perikanan budidaya baik pembenihan maupun pembesaran beberapa faktor penting diantaranya ketersediaan pakan dan penggunaan bibit

yang bermutu. Pakan merupakan salah satu faktor yang memiliki komponen biaya tertinggi dalam kegiatan budidaya perikanan. Sementara itu peningkatan produksi tergantung dengan ketersediaan dan kualitas pakan. Secara nasional saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah mencanangkan program Gerakan Pakan Mandiri (GERPARI) dengan memanfaatkan bahan baku lokal. Diharapkan dengan mempunyai masing-masing daerah memproduksi pakan akan mendorong peningkatan produksi ikan dan peningkatan kesejahteraan. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Pertanian Kota Payakumbuh sekaligus pembudidaya perikanan. Melalui unit pembuatan pakan ikan maka pemanfaatan bahan baku lokal seperti limbah pertanian dan peternakan diharapkan mampu memproduksi pakan ikan minimal untuk membantu pembudidaya ikan di Kota Payakumbuh.

Keterbatasan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya perikanan merupakan satu tantangan yang dihadapi dalam pengembangan perikanan di Kota Payakumbuh. Karena itu maka peluang yang bisa dilakukan adalah dengan memfokuskan kepada budidaya perikanan untuk memproduksi benih ikan karena lahan yang dibutuhkan tidak terlalu luas. Dalam rangka peningkatan produksi benih ikan dapat dilakukan dengan optimalisasi kinerja lembaga pembenihan yaitu Unit Pembenihan Rakyat dan Pembangunan Balai Benih Ikan.

Disamping produksi ikan, daging dan peningkatan populasi maka kegiatan pengolahan perikanan saat ini merupakan salah satu peluang bagi pelaku usaha pengolahan peternakan dan perikanan. Saat ini telah berkembang berbagai produksi olahan perikanan dan peternakan baik dalam bentuk setengah jadi maupun yang langsung dapat dikonsumsi. Produk setengah jadi diantaranya sosis, nugget, dan bakso. Sedangkan olahan yang langsung dapat dikonsumsi seperti rendang baik ikan maupun daging. Untuk saat ini peningkatan kualitas hasil olahan merupakan salah tantangan sekaligus peluang bagi para pelaku usaha pengolahan mulai dari proses produksi, pengemasan sampai pemasaran. Apalagi dengan semakin terbukanya perekonomian global maka persaingan dalam kegiatan produksi dan pemasaran hasil pengolahan akan semakin ketat.

BAB III.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangkaketerpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Selanjutnya secara rinci identifikasi isu-isu strategis menurut fungsi dan urusan pemerintahan daerah sebagai perumusan kebijakan umum dan program pembangunan untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian

Perencanaan kegiatan pembangunan merupakan suatu sistem yang berkelanjutan, keberhasilan dan kegagalan capaian periode sebelumnya menentukan penyusunan rencana pembangunan untuk tahun-tahun selanjutnya. Untuk menghasilkan perencanaan yang lebih baik maka berbagai kendala dan permasalahan yang telah dialami pada pelaksanaan perencanaan kegiatan periode sebelumnya perlu diidentifikasi sebaik mungkin.

Identifikasi permasalahan dilakukan dengan mengevaluasi dan memperhatikan capaian kinerja Dinas Pertanian Kota Payakumbuh dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya produktifitas hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
Belum optimalnya produktifitas hasil tanaman disebabkan karena meurunnya intensitas pertanaman (IP), meningkatnya jumlah kehilangan hasil panen (lossis), Menurunnya mutu benih/bibit bahan tanaman yang terawaskan meningkatnya serangan hama dan penyakit.
2. Belum optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana produksi pertanian
Kurangnya ketersediaan pupuk dan alsintan yang digunakan petani, kurangnya kualitas irigasi pertanian dan masih sedikitnya aksestabilitas pembiayaan kepada petani.
3. Masih kurangnya tingkat SDM dan kelembagaan petani
SDM yang kurang ditandai dengan kurangnya penerapan teknologi budidaya pertanian yang diterapkan masih kesedikit. Masih kurangnya kelembagaan petani juga jadi salah satu factor penyebab dan masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh pertanian ikut menjadi penyebab kurangnya SDM petani.
4. Belum optimalnya inseminasi buatan (IB)
Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pelayanan gangguan reproduksi (Gangrep) serta kurangnya akseptor IB.
5. Menurunnya status kesehatan hewan dan kesmavet.
Hal ini disebabkan Menurunnya identifikasi penyakit hewan, menurunnya penanggulangan penyakit hewan, menurunnya pelayanan kesehatan hewan dan Kurangnya pengawasan PAH dan BPAH.
6. Menurunnya ketersediaan bibit dan pakan ternak
Hal ini dikarenakan kurangnya standar mutu pakan ternak dan kurangnya pemanfaatan teknologi pengolahan pakan ternak juga menjadi andil dalam menurunnya ketersediaan pakan ternak serta kurangnya ketersediaan bibit ternak.

7. Belum optimalnya penggunaan benih ikan unggul
Ketersediaan induk ikan unggul yang tidak memadai dan berakibat kurangnya produksi benih ikan unggul menjadi penyebab belum optimalnya penggunaan benih ikan unggul.
8. Belum optimalnya penggunaan bahan pakan bermutu
Penggunaan bahan pakan yang bermutu masih kurang karena masih kurangnya pembudidaya yang menggunakan pakan bermutu, kurangnya pembudidaya yang menggunakan pakan alternative.
9. Belum optimalnya kesehatan ikan dan lingkungan
Hal ini disebabkan karena menurunnya kualitas air kawasan budidaya perikanan dan ketersediaan obat ikan yang kurang.
10. Belum optimalnya penerapan teknologi anjuran budidaya perikanan
Belum optimalnya penerapan teknologi anjuran budidaya perikanan karena kurangnya kawasan penerapan teknologi anjuran dan kurangnya pembudidaya yang menerapkan teknologi anjuran.
11. Kurangnya pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
Masih rendahnya pengolahan hasil pertanian dan kurang lancarnya operasional TA dan STA menjadi factor kurangnya pemasaran hasil produksi Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
12. Kurangnya pemasaran hasil produksi peternakan
Hal ini disebabkan karena kurangnya pengolahan hasil peternakan dan kurangnya jumlah ternak yang diperdagangkan di pasar ternak.
13. Kurangnya pemasaran hasil produksi perikanan
Hal ini disebabkan karena kurangnya olahan ikan sesuai standar kesehatan dan kurangnya kelompok pengolah hasil perikanan
14. Terjadinya Serangan Pandemi Covid-19 Mempengaruhi segala aspek Kehidupan Masyarakat terutama di Sektor Ekonomi termasuk di sektor pertanian.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan gambaran masa yang akan datang yang ingin diwujudkan oleh pemerintah. Berdasarkan potensi, kondisi dan permasalahan yang ada maka visi dari Kepala Daerah Terpilih sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh tahun 2017 - 2022 adalah **“Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang”**. Untuk mewujudkan visi Kota Payakumbuh tersebut telah ditetapkan beberapa misi yang akan dijalankan. Adapun misi pembangunan jangka menengah Kota Payakumbuh adalah:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Handal, sehat dan Kompetitif
2. Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Bedaya Saing dan Berkeadilan Dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama
3. Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum Yang Nyaman dan Berkelanjutan
4. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

5. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya berdasarkan Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah

Berdasarkan lima misi di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Pertanian mendukung dan melaksanakan misi 2 : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Bedaya Saing dan Berkeadilan Dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama. Selanjutnya telaahan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dengan visi dan misi Kepala Daerah dapat dijelaskan dalam tabel 3.1 :

Tabel.3.1. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih

VISI : Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat, dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan Dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya Produktivitas hasil pertanian dan perikanan 2. Masih kurangnya Sumber daya dan kelembagaan petani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya alih fungsi lahan ke penggunaan non pertanian 2. Belum optimalnya penerapan teknologi pertanian dan perikanan 3. Keterbatasan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan Dinas Pertanian 2. Dukungan Anggaran dan Kebijakan Pemerintah 3. Perkembangan ilmu dan Teknologi

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam penyusunan rencana strategis Dinas Pertanian Kota Payakumbuh tahun 2017 - 2022 maka mempedomani rencana pembangunan pertanian serta kelautan dan perikanan secara nasional dan perencanaan pada dinas terkait di tingkat propinsi. Karena salah satu hal yang mampu mendukung kesuksesan pembangunan adalah adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu maka dalam penyusunan rencana strategis ini perlu dilakukan penelaahan terhadap rencana strategis dari kementerian atau lembaga terkait di tingkat pusat dan provinsi. Telaahan renstra kementerian dan lembaga dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel.3.2. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pencapaian swasembada beras, jagung dan peningkatan produksi daging	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan benih, bibit ternak dan pakan - Sarana dan prasarana belum berfungsi maksimal - Pematangan ternak betina produktif 	Masih rendahnya SDM petani dalam penerapan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya sarana pendidikan (Kampus Politenik Pertanian Payakumbuh) - Adanya sarana peternakan (BIB Buah Sakato, BPTU HMT Padang Mangateh, UPTD Puskesmas Pyk)
2	Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya posisi tawar petani dan peternak - Kurangnya promosi keluar daerah 	Belum adanya peraturan perundangan tentang harga	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya sarana pasar ternak representative (ketersediaan pasar local, regional) - Letak Strategis Kota Payakumbuh di Perlintasan dari Provinsi Riau
3	Peningkatan kesejahteraan petani	Belum optimalnya sarana	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya SDM petani - Masih rendahnya kualitas produksi 	Adanya ketersediaan dana APBD dan APBN

Tabel.3.3. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Kementerian	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Meningkatnya kapasitas sentra – sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan	1. Masih rendahnya produksi benih ikan	1. Keterbatasan sarana pembenihan 2. Kurangnya penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	Tersedianya induk ikan unggul (SNI) Tersedianya dana APBD Prop dan APBN
2.	Meningkatnya pendapatan	Kurangnya pembinaan dari aparat	Kurangnya animo masyarakat berusaha di bidang perikanan	Tersedianya sarana budidaya perikanan
3.	Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan	Rendahnya konsumsi ikan per kapita masyarakat	Kurangnya sosialisasi gizi pentingnya makan ikan	Produksi ikan konsumsi mencukupi

Tabel.3.4. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumbar beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian - Keterbatasan akses petani terhadap permodalan 	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin tingginya alih fungsi lahan - Menurunnya kesuburan lahan pertanian - Menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen dari pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas - Fasilitas ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air

Tabel.3.5. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pertumbuhan tingkat produksi rata-rata komoditas peternakan di Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Belum berkembangnya usaha pembibitan di masyarakat karena membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih mahal - Keterbatasan akses petani terhadap teknologi informasi dan permodalan - Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas lapangan - Motivasi masyarakat untuk berternak sangat dipengaruhi oleh kondisi harga jual produk ternak 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas - Tingginya permintaan bibit ternak dari masyarakat

Tabel.3.6. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Prop. Sumbar beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Meningkatnya produksi, mutu hasil perikanan budidaya dan kesejahteraan pembudidaya	Biaya produksi usaha perikanan relatif tinggi	Kurangnya ketersediaan bahan baku pakan ikan	Tersedianya Unit Pembuatan Pakan Ikan
2.	Meningkatnya pemasaran ikan dalam negeri dan luar negeri, penyediaan ikan untuk konsumsi dan unit pengolahan	Rendahnya minat masyarakat mengkonsumsi ikan	Kurangnya keanekaragaman produk olahan perikanan	Produksi ikan konsumsi mencukupi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel.3.7. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No	Rencana RTRW terkait tupoksi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Peruntukan Kawasan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya sosialisasi perda RTRW 2. Belum adanya Perda perlindungan lahan budidaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan lahan untuk kegiatan pertanian pada umumnya 2. Tingginya laju alih fungsi lahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan teknologi budidaya 2. Tersedianya kawasan peternakan terpadu (SPPK 3) Koto Panjang Payobasung Kec.Pyk Timur.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 maka pola pemanfaatan ruang, ketersediaan lahan serta daya dukung lingkungan harus diperhatikan. Karena kegiatan yang dilakukan keberhasilan kegiatan nantinya khususnya sektor pertanian dan perikanan sangat tergantung kepada lahan.

Telaahan terkait RTRW yang diuraikan sebagai berikut.

1. Keterbatasan ketersediaan lahan
Kota Payakumbuh dengan luas 80,42 Km² sementara luas areal yang merupakan areal pertanian hanya 30%. Dari ketersediaan areal yang hanya 30% termasuk didalamnya kegiatan pertanian dan perikanan. Dengan demikian lahan menjadi faktor pembatas dalam peningkatan produksi secara ekstensifikasi. Sementara perluasan areal merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produksi pertanian dan perikanan dan. Dengan keterbatasan areal tersebut maka untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hanya dapat dilakukan secara intensifikasi dengan menerapkan berbagai teknologi budidaya.
2. Tingginya laju konversi lahan
Pada saat ini banyak lahan pertanian yang dikonversi menjadi lahan nonpertanian, walaupun konversi tersebut diperlukan karena pertumbuhan penduduk akan pemukiman dan infrastruktur. Pertumbuhan penduduk Kota Payakumbuh disamping karena pertumbuhan angka kelahiran juga karena tingginya migrasi. Tingginya angka migrasi ke Kota Payakumbuh disebabkan beberapa hal diantaranya banyaknya penduduk luar daerah yang berkeinginan untuk tinggal dan menetap di Kota Payakumbuh karena ingin tinggal di daerah yang aman dari permasalahan bencana sehingga perkembangan pemukiman/perumahan cukup pesat. Akan tetapi sayangnya lahan yang digunakan untuk perumahan adalah lahan potensial untuk pertanian.
Disamping untuk perumahan, banyak areal pertanian yang digunakan untuk pembangunan jalan, kegiatan perbengkelan dan pengembangan usaha lainnya.

3. Menurunnya kualitas lahan
 Secara umum kondisi lahan di Kota Payakumbuh pada awalnya merupakan lahan yang subur. Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu dan pemamfaatan yang dilakukan untuk kegiatan pertanian, perikanan dan peternakan maupun non pertanian telah menyebabkan penurunan kualitas tanah. Beberapa hal yang menyebabkan penurunan kualitas atau kesuburan tanah antara lain penggunaan bahan-bahan kimia yang belum terkendali dalam kegiatan pertanian serta buangan limbah industri dan perbengkelan.
 Dalam pelaksanaan kegiatan pertanian dan perikanan, walaupun tidak terlalu besar tapi pengaruh kondisi lahan tetap signifikan. Karena dalam pelaksanaan kegiatan kesuburan lahan akan sangat berpengaruh seperti peningkatan produktivitas lahan, penyediaan hijauan dan pertumbuhan pakan alami dalam kolam.
4. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air (Neraca Air)
 Semakin tingginya pertumbuhan pemukiman dan bangunan fisik yang dilakukan dengan mengkonversi lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan secara tidak langsung telah menyebabkan penurunan jumlah atau kapasitas air. Karena konversi lahan telah menyebabkan berkurangnya sumber-sumber air dan penyerapan air, sehingga ketersediaan air tanah mengalami penurunan.
 Kualitas air di Kota Payakumbuh pada saat ini telah mengalami penurunan karena banyaknya kegiatan industri yang melakukan pembuangan limbah ke sungai, disamping itu juga banyaknya buangan sampah rumah tangga juga menyebabkan pencemaran air.

3.5. Penentuan Isu Isu Strategis

Metode penetapan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pertanian Kota Payakumbuh dilakukan dengan metode pembobotan sebagai berikut:

- a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan seperti tabel berikut:

Tabel: 3.8 Skor Kriteria penentuan isu-isu strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kabupaten Kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	15
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap public	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15
	Total	100

- b. Dilakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala ke						Total
		1	2	3	4	5	6	
1	Belum optimalnya produksi perikanan	20	10	15	10	10	10	75
2	Belum optimalnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	20	15	20	15	10	10	90
3	Belum optimalnya peningkatan populasi ternak	20	15	20	10	10	10	85

- c. Selanjutnya dihitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dan disusun sesuai dengan peringkat tertinggi, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Rata-rata Skor Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata skor
1	Belum optimalnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	90	
2	Belum optimalnya peningkatan populasi ternak	85	
3	Belum optimalnya produksi perikanan	75	

Isu-isu strategis yang mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian antara lain adalah :

1. Belum optimalnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai yang direkomendasikan oleh balai penelitian disebabkan karena belum optimalnya penerapan teknologi budidaya pertanian/pertanian/perikanan.
2. Belum optimalnya peningkatan populasi ternak
Pemenuhan kebutuhan daging merupakan salah satu target nasional dalam pembangunan peternakan. Selama ini pemenuhan kebutuhan daging secara nasional masih tergantung dari daging impor. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap daging impor maka direncanakan target swasembada daging tahun 2019 oleh Kementerian Pertanian. Untuk Kota Payakumbuh, secara konsumsi daging perkapita diatas konsumsi daging nasional, hal ini mungkin disebabkan karena pengaruh budaya dimana makan daging sudah menjadi kebiasaan bahkan menjadi menu pokok dalam setiap acara yang dilakukan. Untuk itu kedepannya dalam rangka meningkatkan produksi daging maka beberapa kegiatan yang bisa dilakukan di Kota Payakumbuh adalah dengan bergerak pada penyiapan bibit sapi dan sapi potong karena tidak memerlukan lahan yang terlalu luas. Untuk mengoptimalkan kegiatan diatas Dinas Pertanian turut menjadi cikal bakal terbentuknya UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak yang berlokasi di Kelurahan Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan dengan populasi ternak sapi sebanyak 21 ekor.
3. Belum optimalnya produksi perikanan
Peningkatan produksi perikanan perlu dilakukan karena sejak lama Payakumbuh merupakan sentra produk ikan air tawar seperti lele, nila dan gurame.

4. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani

Peningkatan pendapatan petani ditandai dengan meningkatnya nilai tukar petani (NTP). Semakin tinggi rasio antara indeks harga yang diterima dengan indeks harga yang harus dibayar petani maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan petani.

BAB IV.

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Pertanian

Visi adalah suatu gambaran masa depan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu instansi atau organisasi yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dengan mempertimbangkan potensi yang tersedia serta memperhatikan kondisi yang diharapkan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Sehubungan dengan itu, maka visi Dinas Pertanian Kota Payakumbuh untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah :

Visi : “Terwujudnya Kemandirian, Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”

Misi : Dalam rangka pencapaian visi tersebut ditetapkan misi yang merupakan arah dan batasan proses yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Misi Dinas Pertanian Kota Payakumbuh adalah:

“Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan”.

Untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan memotivasi kinerja Aparatur Pertanian serta Stake Holder terkait, maka Dinas Pertanian mempunyai Moto “ **GERBANG TANI MADANI**” dengan akronim : “**Gerakan Pembangunan Pertanian Madani**”. Arti MADANI adalah suatu masyarakat yang beradab dalam membangun dan memaknai kehidupannya. Sedangkan akronim Madani adalah :

M = Masyarakat

A = Agamis

D = Dinamis

A = Akuntabel

N = Normatif

I = Inovatif

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian

4.2.1. Tujuan Dinas Pertanian

Untuk merealisasikan misi perlu ditetapkan tujuan Dinas Pertanian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ini merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan.

Tujuan itu dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan dan peternakan di Kota Payakumbuh.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tujuan Jangka Menengah Dinas Pertanian adalah:

Meningkatnya Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB

4.2.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan teratur dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai Dinas Pertanian adalah sebagai berikut .:

- Meningkatnya produksi Tanaman Pangan, Hortikultura.dan perkebunan
- Meningkatnya populasi ternak.
- Meningkatnya produksi ikan konsumsi.
- Menigkatnya kesejahteraan petani
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian

Adapun Perubahan Target dari Indikator masing-masing sasaran dapat di lihat dari Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU/SPM)	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-						Ket		
							2017	2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	3	4			5	6	7	8	9	10	11		
1	Meningkatnya Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	1	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1	Produksi Padi	ton	37,402	37,500	37,750	38,588	40,517	41,543	43,000	IKU
					TARGET YANG DIREVISI						41,000	41,200			
					2	Produksi Cabe	ton	973,9	980	980	985	985	990	990	
					TARGET YANG DIREVISI						900	905			
					3	Produksi Bawang	ton	-	180	200	300	400	500	600	
			TARGET YANG DIREVISI						215	220					
			4	Produksi Kakao	ton	1,092	1,095	1,095	1,095	1,100	1,170	1,230			
			TARGET YANG DIREVISI						1,105	1,110					
			5	Produksi Jagung	ton						2,900	2,950			
			2	Meningkatnya Populasi Temak	6	Populasi Sapi	Ekor	5,510	5,620	5,732	5,846	5,962	6,080	6,200	IKU
TARGET YANG DIREVISI								5,992	6,025						
7	Jumlah Kelahiran Sapi	Ekor										800	820		
3	Meningkatnya Produksi Perikanan	9	Produksi Ikan Konsumsi	Ton	433,27	482,25	500,00	520,00	540,00	550,00	560,00	IKU			
4	Meningkatnya kesejahteraan petani	10	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	100,32	100,38	100,51	100,61	100,73	100,80	101,00	IKU			
					TARGET YANG DIREVISI						100,15 %	100,22 %			
5	Meningkatnya	11	Niai AKIP			BB	BB	A	A	A	A	IKU			

Tabel 4.1

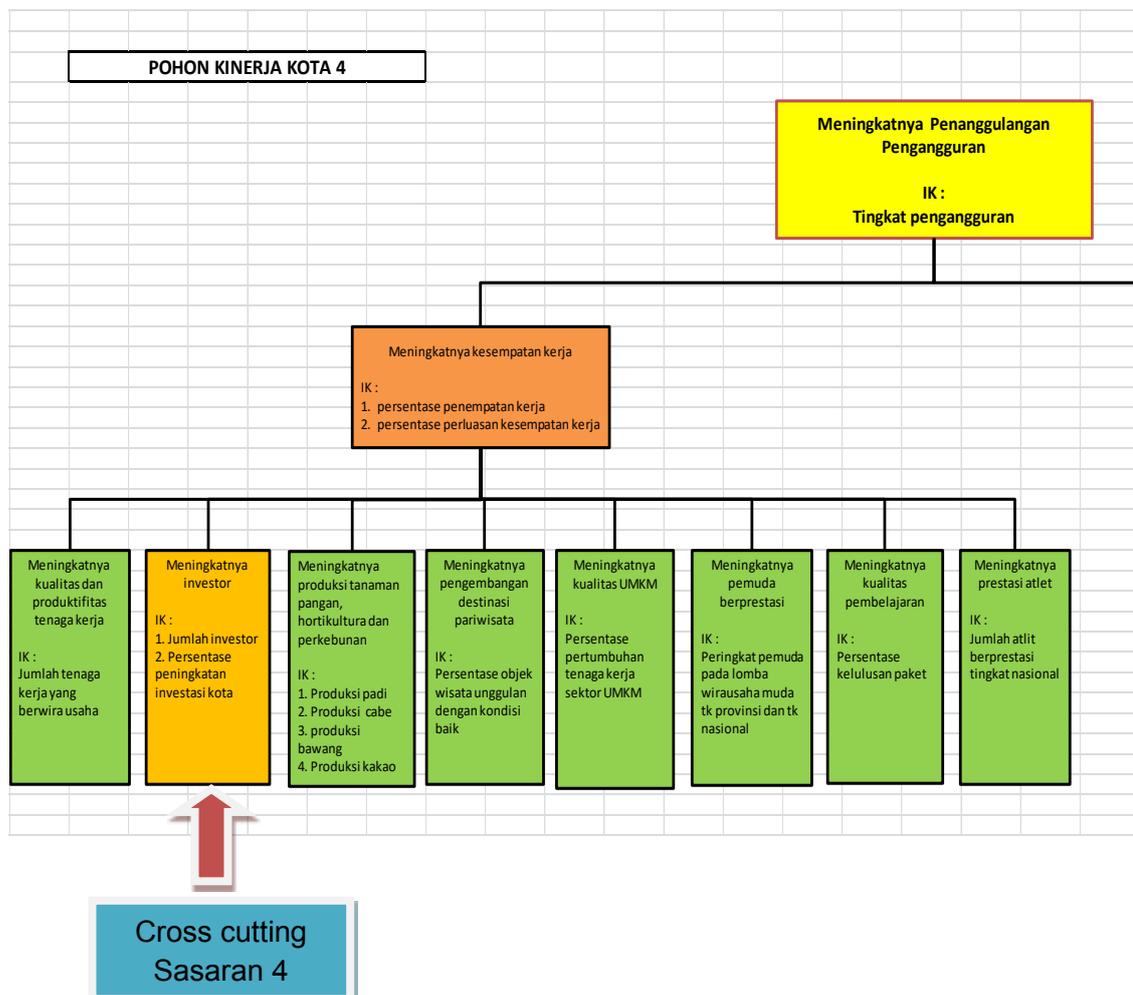
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian Setelah Perubahan

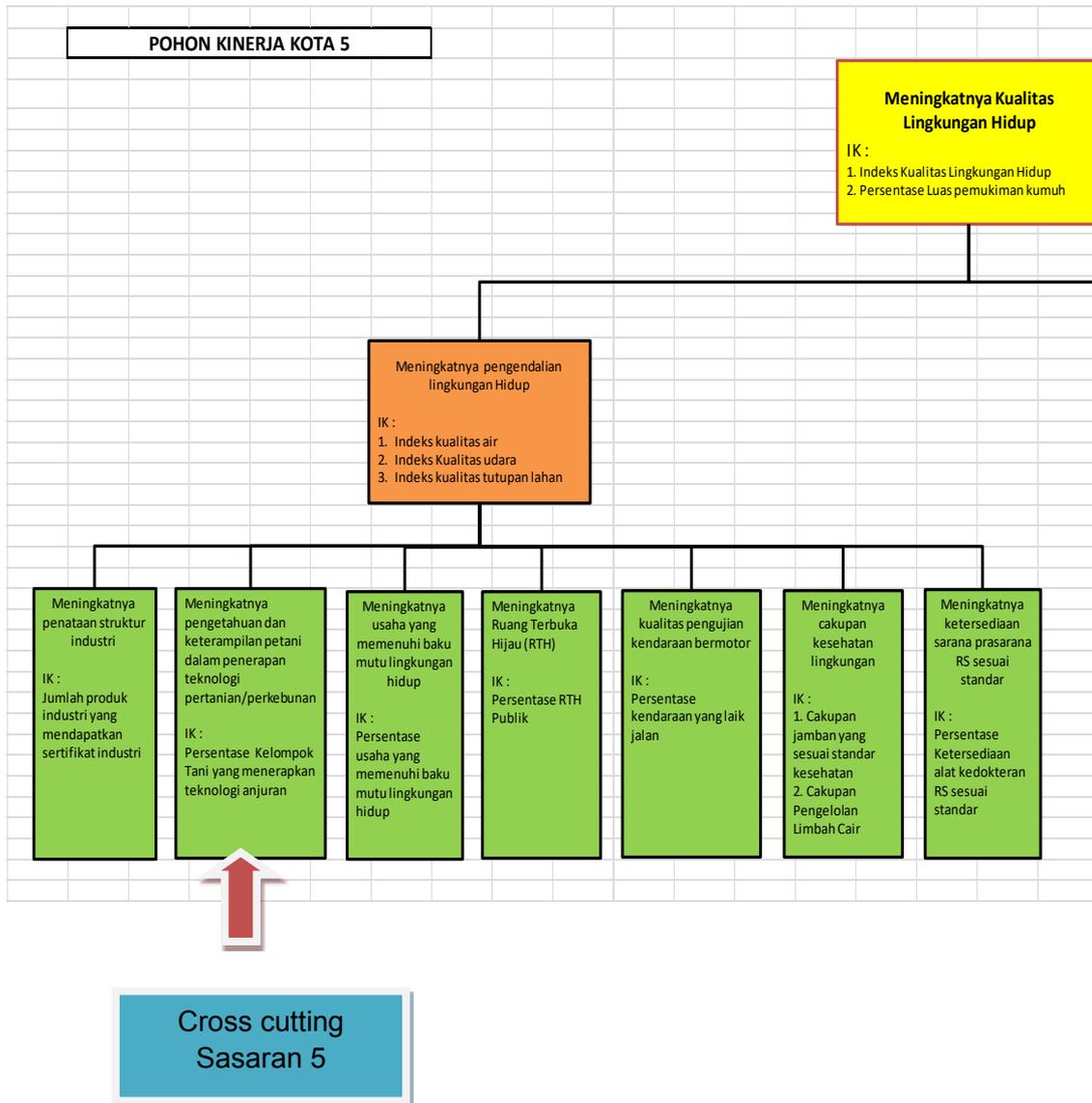
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU/SPM)	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD 2016	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-						Ket
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	3	4			5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	1 Meningkatkan Produksi Pertanian	1 Persentase Pencapaian Target Produksi Pertanian (Fokus Pada 3 Komoditi Pertanian Produksi Ikan Konsumsi, Produksi Padi, Populasi Sapi)	%						100	100	IKU
			2 Meningkatkan AKIP Dinas Pertanian	2 Niai AKIP			BB	BB	A	A	A	A	IKU

Ada Beberapa target yang dilakukan perubahan dalam Revisi Renstra Dinas Pertanian Tahun 2017-2022, perubahan target tersebut didasarkan atas evaluasi kinerja yang telah dilakukan tahun 2017 sampai tahun 2019 dan mengkaji tentang perkembangan potensi dan hambatan yang sedang berlangsung saat ini. Selain itu juga adanya penyesuaian target dengan Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh dimana terjadi pengurangan Indikator Kinerja Utama masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Sekaitan dengan telah dilakukannya evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama sebelumnya dimana IKU dinas yang bersifat Crosscutting seperti Nilai Tukar Petani (NTP) tidak bisa dijadikan IKU Dinas Pertanian, karena Dinas Pertanian tidak bisa secara penuh melakukan interpersi terhadap pencapaian Nilai Tukar Petani tersebut.

Jadi kondisi setelah dilakukannya perubahan IKU Dinas Pertanian yang semulanya 5 (Lima) IKU dan 5 (Lima) sasaran, dimana sebelumnya menitik beratkan kepada pencapaian produksi dibanding target, sekarang mengedepankan 2 IKU Dinas yaitunya Persentase capaian target Produksi Pertanian yang menjadi IKU Utama dan Nilai AKIP Dinas Pertanian sebagai IKU Pendukung, dimana IKU saat ini lebih menitikberatkan rata-rata capaian target Produksi Pertanian dari 3 Komoditi Utama yaitu padi, sapi dan ikan konsumsi dari tahun sebelumnya.

Selain itu juga disasaran sasaran yang ada pada Dinas Pertanian secara bersama-sama dengan OPD lain juga mendukung sasaran yang lebih tinggi di Tingkat Kota, yaitu menanggulangi Tingkat Pengangguran dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dapat dilihat dari Crosscutting pada gambar dibawah ini :





Kedua sasaran tersebut sudah di tampung dalam pohon kinerja dinas pertanian kota payakumbuh yang dapat dilihat pada lampiran Renstra ini.

BAB V. **STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

14.1. Strategi dan Kebijakan

Untuk menetapkan strategi yang akan diterapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanian diperlukan kajian dan analisa terhadap faktor-faktor yang akan mempengaruhi.

Dalam menganalisa ini digunakan analisis SWOT yang menggunakan 4 (empat) faktor yang mempengaruhi yaitu :

1. Strength (Kekuatan) disingkat dengan S, yaitu karakteristik organisasi yang memberikan kelebihan/keuntungan dibandingkan dengan yang lainnya yang merupakan faktor internal
2. Weakness (Kelemahan) disingkat dengan W, yaitu karakteristik yang berkaitan dengan kelemahan pada organisasi dibandingkan dengan yang lainnya dan merupakan faktor internal
3. Opportunities (Peluang) disingkat dengan O, yaitu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi untuk dapat berkembang di kemudian hari dan merupakan faktor eksternal
4. Threats (Ancaman) disingkat dengan T, yaitu ancaman yang akan dihadapi oleh organisasi yang dapat menghambat perkembangannya dan merupakan faktor eksternal
5. Berdasarkan potensi dan kondisi kota Payakumbuh, maka analisa SWOT untuk pelayanan Pertanian kota Payakumbuh dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian

	Internal	Strength / kekuatan (S)	Kelemahan (Weakneses)
Eksternal		<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen pemerintah terhadap pembangunan pertanian - Regulasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuantitas dan kualitas SDM yang terbatas. - Sarana dan prasarana belum memadai - Database potensi wilayah belum memadai
Peluang (Opportunities)			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peluang pasar terbuka luas. 2. Adanya teknologi tepat guna. 3. Produktivitas pertanian masih dapat ditingkatkan. 4. Tersedianya petani/ kelompok tani. 		<ul style="list-style-type: none"> - Memberdayakan SDM secara maksimal dalam menghadapi permintaan pasar untuk mendorong berkembangnya industri pengolahan dan pemasaran hasil. - Meningkatkan sarana dan prasarana produksi untuk meningkatkan produktivitas - Meningkatkan kualitas SDM untuk memanfaatkan perkembangan IPTEK. - Optimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas untuk memberdayakan petani/kelompok tani. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memanfaatkan pengelolaan data statistik untuk meningkatkan permintaan pasar. - Tingkatkan IPTEK untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petanidanpetugas. - Tingkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan program untuk meningkatkan produktivitas. - Memeratakan beban kerja untuk mengoptimalkan kelembagaan kelompok tani.
Ancaman (Threats)			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Alih fungsi lahan, terbatasnya air irigasi dan ancaman iklim yang tidak menentu. 2. Fluktuasi harga komoditi pertanian. 3. Rendahnya akses petani kesumber permodalan. 4. Lemahnya fungsi kelembagaan kelompok tani dan SDM petani. 5. Diberlakukannya MEA 		<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas untuk menekan alih fungsi lahan pertanian dan irigasi - Optimalkan Sumberdaya manusia untuk memfungsikan kelembagaan kelompok tani dan SDM petani - Tingkatkan sarana dan prasarana pertanian untuk menekan fluktuasi harga komoditi pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Memanfaatkan data statistik untuk memantau fluktuasi harga komoditi pertanian - Tingkatkan perencanaan dan pengawasan program / kegiatan untuk meminimalisir alih fungsi lahan pertanian dan air irigasi . - Tingkatkan keterampilan dan pengetahuan petugas untuk memantapkan fungsi kelembagaan kelompok tani dan SDM petani - Meningkatkan kualitas dan kontinuitas produk

Dari analisa SWOT diatas, ditetapkan strategi sebagai berikut :

- Meningkatkan Ketersediaan sarana dan prasarana produksi Tanaman Pangan
- Meningkatkan Ketersediaan sarana dan prasarana produksi Tanaman Hortikultura
- Mengoptimalkan Germas dan Pemangkas, Fermentasi Kakao dan PHT Kakao
- meningkatkan kuantitas kualitas pelayanan Inseminasi Buatan
- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi Perikanan
- Meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola usaha tani mulai dari hulu ke hilir

5.2. Kebijakan Dinas Pertanian

Kebijakan Dinas Pertanian berdasarkan strategi diatas adalah :

- Intensifikasi dan mekanisasi pertanian
- Peningkatan Luas Tanam dan Pola Tanam
- Intensifikasi Tanaman Kakao
- melakukan pengembangan sistem pelayan inseminasi buatan
- Intensifikasi perikanan Penyediaan bibit varietas unggul;
- Pelatihan dan Penerapan Inovasi teknologi anjuran ditingkat petani.

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Terwujudnya Kemandirian, Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani		
Misi	Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. 2. Meningkatnya Populasi Ternak 3. Meningkatnya Produksi Perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan 2. Meningkatkan Ketersediaan sarana dan prasarana produksi Tanaman Hortikultura 3. Mengoptimalkan germas pemangkasan, fermentasi kakao dan PHT Kakao 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan IB 5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensifikasi dan mekanisasi pertanian 2. Peningkatan luas tanam, pola tanam dan Indeks Pertanian 3. Intensifikasi Tanaman Kakao 4. Melakukan dan pengembangan & sistem pelayanan inseminasi buatan (IB) 5. Intensifikasi perikanan 6. Pelatihan dan penerapan inovasi teknologi anjuran pertanian dan perikanan

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota payakumbuh juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Organisasi Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 6.1

		7. Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan		24 item	34.968.500	24 item	34.968.500	52 item	27.536.900	57 item	33.021.000	45 item	46.585.000				5 tahun	107.142.900
		8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah spanduk yang diadakan, barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	165.950.000	1 tahun	18.150.000	1 tahun	18.150.000	1 tahun	12.037.500	12 bulan	18.320.000	1 tahun	29.150.000				1 tahun	59.507.500
		9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan		14 item	8.526.000	14 item	8.526.000	10 item	6.994.000	12 item	6.785.000	25 item	11.400.000				5 tahun	25.179.000
		10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan		4 media	17.052.950	4 media	17.052.950	1080 exp	5.984.000	500 exp	2.994.000	1 media	5.000.000				4 media	13.978.000
		11. Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan dan minum/snack yang disediakan		1230 porsi	31.098.000	1230 porsi	31.098.000	1550 porsi	48.339.250	1580 porsi	55.084.050	1.640 porsi	46.300.000				8.260 porsi	149.723.300
		12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan		1 tahun	254.577.100	1 tahun	254.577.100	1 tahun	239.778.172	12 bulan	428.530.487	1 tahun	240.000.000				5 tahun	908.308.659
		13. Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga adm/teknis perkantoran yang dibayarkan		11 orang	126.307.210	11 orang	126.307.210	7 orang	177.190.558	4 orang	115.429.631	7 orang	169.536.350				35 orang	462.156.539
		14. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan										12 jenis	160.000.000				5 jenis	100.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80,00%	454.545.100	80,00%	454.545.100	80,00%	405.841.533	80,00%	665.533.663	80,00%	680.900.000					80,00%	2.206.820.296
		1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah dan luas gedung kantor yang direhap		1 unit	11.762.250	1 unit	11.762.250	1 unit	24.500.000	1 unit	275.812.212	2 unit	80.000.000				5 unit	380.312.212
		2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan		10 unit roda 4, 1 unit truk, 130 unit bentor, 130 unit kend. Roda 2	442.782.850	10 unit roda 4, 1 unit truk, 130 unit bentor, 130 unit kend. Roda 2	442.782.850	8 unit roda 4, 1 unit truk, 1 unit bentor, 125 unit kend. Roda 2	381.341.533	8 unit roda 4, 1 unit truk, 96 unit bentor, 96 unit kend. Roda 2	389.721.451	8 unit roda 4, 1 unit truk, 130 unit bentor, 130 unit kend. Roda 2	600.900.000				40 unit roda 4, 5 unit truk, 5 unit bentor, 650 unit kend. roda 2	1.371.962.984
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100,00%	74.052.000	100,00%	74.052.000	100,00%	71.808.000	100,00%	57.150.000	100,00%	89.800.000					100,00%	218.758.000
		1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan		165 stel	74.052.000	165 stel	74.052.000	130 stel	71.808.000	127 stel	57.150.000	170 stel	89.800.000				860 stel	218.758.000

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh inspektorat	BB	23.073.700	BB	23.073.700	BB		A		A	29.800.000					A	
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi OPD		18 dokumen laporan	9.721.000	18 dokumen laporan	9.721.000					18 laporan	12.100.000						
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik		1 paket	13.352.700	1 paket	13.352.700					2 paket	17.700.000						
	Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (permendagri 90)		Nilai IKM										86	11.264.551.963	89	11.264.551.963	175	22.529.103.926	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan											90%	93.579.160	90%	93.579.160			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik											2 Dokumen	43.284.160	2 Dokumen	43.284.160			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi OPD											2 Dokumen	50.295.000	2 Dokumen	50.295.000			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan thd aliran kas											90%	9.753.949.250	90%	9.449.449.250			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah pengelola administrasi keuangan - Jumlah PNS yang dibayarkan gaji dan Tunjangan											12 Bulan 90 Orang	9.753.949.250	12 Bulan 90 Orang	9.449.449.250			

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														110 stel	49.500.000		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan													110 stel	49.500.000		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Keadaan Baik											80%	267.892.580	80%	267.892.580		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan											28 item	4.991.140	28 item	4.991.140		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor yang digunakan											3 Jenis	43.554.580	3 Jenis	43.554.580		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah spanduk yang diadakan, barang yang dicetak, digandakan dan											1 tahun	19.999.860	1 tahun	19.999.860		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan											1080 exp	2.955.000	1080 exp	2.955.000		
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah porsi makan dan minuman snack yang disediakan											100 porsi	3.500.000	200 porsi	3.500.000		
	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan											1 tahun	192.892.000	1 tahun	192.892.000		
	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Keadaan Baik											80%	440.716.828	80%	440.716.828		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar											610 lbr	3.000.000	610 lbr	3.000.000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik											12 bulan	224.639.920	12 bulan	224.639.920		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga adm/teknis perkantoran yang dibayarkan											84 OB	213.076.908	84 OB	213.076.908		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Keadaan Baik											80%		80%	205.000.000		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang dibeli													10 unit	5.000.000		

		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di bangun													1 unit	200.000.000		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Keadaan Baik											80%	480.611.220	80%	530.611.220		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayar KIR dan Pajak Kendaraan											110 unit	440.140.000	110 unit	440.140.000		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perbaikan peralatan Kerja											2 unit	19.980.620	3 unit	19.980.620		
		Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan lainnya.	Jumlah dan luas gedung kantor yang direhab											1 unit	20.490.600	1 unit	70.490.600		
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Populasi sapi yang dikelola											110 ekor	227.802.925	110 ekor	227.802.925		
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah ketersediaan bibit temak temak											110 ekor 4000 kg	227.802.925	110 ekor 4000 kg	227.802.925		
	Meningkatnya Produksi Pertanian	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,38	452.632.750	100,38	452.632.750	100,51	221.958.440	100,61	181.629.485	100,73	502.991.305					101,00	1.359.211.980
		1. Peningkatan sistim insentif dan desentif bagi petani dan kelompok tani	jumlah asuransi usaha temak sapi ; jumlah asuransi usaha tani ; jumlah Gapoktan dan LKMA yang dibina	800 Ha		800 Ha		800 Ha / 200 ekor	27.938.650	5 kecamatan	43.565.935	800 Ha/200 ekor	100.000.000					4000 Ha/100 ekor	171.504.585
		2. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	1. Jumlah Peserta Pekan Nasional (Penas) Tani dan Nelayan yang difasilitasi	-		-		64 orang		64 orang		64 orang	114.991.305					320 orang	326.038.295
			2. Jumlah peserta pelatihan bagi petani dan pelaku agribisnis	-	370.995.000	-	370.995.000	30 orang		30 orang	106.509.440	30 orang						150 orang	
			3. Jumlah Magang peningkatan SDM bagi petugas	-		-		10 orang		10 orang		10 orang						50 orang	
			4. Jumlah Peserta Pelatihan Budidaya Pertanian/Perkebunan	-		-		35 orang		34 orang		35 orang						175 orang	

		3. Peningkatan kemampuan lembaga petani	1. Jumlah pelatihan Adm kelembagaan Klp tani		45 orang		45 orang		45 orang	87.510.350	45 orang		45 orang	288.000.000				45 orang	409.036.350
			2. Jumlah kelompok tani yang dinilai		273 kelompok	81.637.750	273 kelompok	81.637.750	273 kelompok		273 kelompok	33.526.000	273 kelompok					273 kelompok	
			3. Jumlah kelompok tani berprestasi		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok					1 Kelompok	
			4. Jumlah Pelaksanaan mimbar sarasehan Tk.Kec dan Tk Kota yang dilaksanakan		6 kali		6 kali		6 kali		6 kali		6 kali					6 kali	
	Meningkatnya Produksi Pertanian	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan		Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi pertanian/Perkebunan Unggulan	20,00%	124.816.550	20,00%	124.816.550	-	-	27,00%	37.853.000	28,00%	39.745.650				30,00%	202.415.200
		1. Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah buku SOP Mutu Hasil Produk Pertanian										1 buku	140.000.000				1 buku	140.000.000
		2. Fasilitas Kerjasama Regional/Nasional/Internasional penyediaan Hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah ekspansi pasar/penjajakan pasar ke luar daerah		1 lokasi	26.298.500	1 lokasi	26.298.500			0	1 lokasi	0					1 lokasi	0
			Jumlah peserta temu usaha agribisnis		20 orang		20 orang					20 orang						20 orang	
		3. Pengembangan sistem informasi pasar	Jumlah buku pengembangan STA		30 buku		30 buku					30 buku						30 buku	0
			Jumlah leaflet informasi komoditi pertanian		1500 lbar	64.600.900	1500 lbar	64.600.900			0	1500 lbr	0					1500 lbr	

		4. Pelatihan pengolahan hasil Pertanian	Jumlah Pelatihan Pengolahan Cabe Tingkat Kota		1 kali	33.917.150	1 kali	33.917.150		1 kali	37.853.000	1 kali	77.175.000					1 kali	115.028.000	
			Jumlah Pelatihan Pengolahan Labu Tingkat Kota		1 kali		1 kali			1 kali		1 kali						1 kali		
		5. Operasional Terminal Agribisnis	Jumlah Sarana Prasarana Terminal Agribisnis		-	-	-	-	-	-	-	3 jenis	175.000.000					5 jenis	175.000.000	
			Jumlah Honor THL yang dibayarkan		-	-	-	-	-	-	-	2 orang						2 orang		
		Program Pertanian Usaha Pertanian (permendagri 90)	Persentase fasilitas pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan										29,00%	30,00%	10.031.690	30,00%	10.031.690	30,00%	20.063.380	
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota											6 UP3HP	10.031.690			10.031.690			
		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah UP3HP										6 UP3HP	10.031.690	6 UP3HP	10.031.690				
	Meningkatnya Produksi Pertanian	Program Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan																6,00 ton/ha		
																		12,00 ton/ha		
																		15,00 ton/ha		
																		1,40 ton/ha		
		1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	jumlah sarana prasarana tekno pertanian yang diadakan																Opkup GP calon Benih 20 ton; Benih padi berlabel/ber sertifikat 16 ton; honor THL 2920 Shift	0
		2. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	1. Jumlah Demplot Padi																1 lokasi (0,1 ha)	0
			2. Jumlah Demplot Cabe																1 lokasi (0,1 ha)	
			3. Jumlah Demplot Bawang																1 lokasi (0,1 ha)	
			4. Jumlah Demplot kakao																100 batang	
		3. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna																5 pelatihan/5 kecamatan	0
		4. Peningkatan produksi dan mutu produk horti melalui gerakan mandiri hortikultura (gema horti)	luas lahan yang ditanam sayuran bawang																10 ha	0

Meningkatnya Produksi Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (permendagri 90)		Produktivitas padi										5,17 ton/ha	981.531.225	5,18	981.531.225	5,19 ton/ha	1.963.062.450
			Produktivitas bawang merah									8 ton/ha	9 ton/ha					
			Produktivitas Cabe									6,84 ton/ha	6,94 ton/ha					
			Produktivitas kakao									0,95 ton/ha	0,96 ton/ha					
			Produktivitas jagung									7,77 ton/ha	7,93 ton/ha					
			populasi sapi									5992 ekor	6025 ekor					
			Jumlah kelahiran sapi									800 ekor	820 ekor					
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah sarana pertanian											140.721.682		140.721.682			
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	- Jumlah penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi - Jumlah Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi											5 kec 5 kec	39.190.804	5 kec 5 kec	39.190.804		
	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah komoditi yang diolah di terminal agribisnis Jumlah sarana pendukung pertanian yang difasilitasi Jumlah sarana pengolahan hasil pertanian yang diadakan Jumlah THL yang dibayarkan											3 jenis 7 TA/STA 3 jenis 12 OB	101.530.878	3 jenis 7 TA/STA 3 jenis 12 OB	101.530.878		
	Pengawasan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro	luas tanam											595.009.613		595.009.613			
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	- Jumlah benih padi berlabel - Jumlah honor THL - Jumlah opkup GKP Calon Benih padi											12.5 ton THL 60 ob 17 ton	390.942.863	12.5 ton THL 60 ob 17 ton	390.942.863		
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	- Jumlah luas pengembangan bawang - jumlah luas pengembangan padi											4 ha 110 ha	204.066.750	4 ha 110 ha	204.066.750		
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih / Bibit Temak dan Hijauan	Jumlah Ketersediaan Sarana IB											245.799.930		245.799.930			
	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Temak dan Hijauan Pakan Temak	Jumlah pengadaan bibit temak Jumlah pengadaan pakan temak Jumlah populasi sapi yang dipelihara											2000 dosis 21.5 ton 110 ekor	245.799.930	2000 dosis 21.5 ton 110 ekor	245.799.930		

	Meningkatnya Produksi Pertanian	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		Produksi padi														43.000 ton				
				Produksi cabe																990,00 ton		
				Produksi bawang																	600,00 ton	
				Produksi Kakao																	1230,00 ton	
		1.Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Jumlah sarana produksi pertanian/perkebunan yang diadakan															5 unit	0			
		2. Gemas (gerakan massal) pemangkasan Kakao	Jumlah Pelatihan Pemangkasan Kakao															100 Orang	0			
		3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1. Jumlah kecamatan Pemanfaatan Alsintan															5 kecamatan	0			
			2. Jumlah penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi															5 kecamatan				
		4. Pengendalian hama dan Penyakit pada Tanaman Pertanian / Perkebunan	Jumlah Lokasi Pengendalian OPT Pada Tanaman Kakao															5 kecamatan	0			
		5.Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	1. Jumlah Pembibitan Cabe;															10.000 batang	0			
			2. luas lahan yang ditanami bawang																0,25 ha			
			3. Jumlah varietas padi unggul lokal yang dikembangkan																100 persen			
		6. Peningkatan produktivitas dan mutu produk florikultura berkelanjutan	Jumlah Demplot Tanaman Hias															5 kelompok	0			
			Jumlah Pameran Tanaman Hias Tk. Kota dan Tk. Provinsi yang diikuti																1 kali			
		7.Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Jumlah Peringatan Pangan dan Florikultura Nusantara																1 kali			
			Luas area demonstrasi intensifikasi tanaman padi																5 ha	0		
			- Luas area demonstrasi pemakaian alsintan untuk padi																5 ha			
			3. Jumlah Posko PHT yang dibina															100%				
		8.Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan	Jumlah luas lahan yang didata dan diukur ; Jumlah naskah akademis LP2B															5 kecamatan	0			

				Produksi padi										41000 ton		41200 ton		83187	
				Produksi bawang merah										215 ton		220 ton		445	
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (permendagri 90)		Produksi cabe										900 ton	113.999.540	905 ton	113.999.540	1815	227.999.080
				Produksi kakao										1,105 ton		1,110 ton		2400	
				Produksi jagung										2,942 ton		3003 ton		2793 ton	
				Persentase Capaian Target Produksi Pertanian										102.5%		103.00%		2%	
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kab/Kota													113.999.540		113.999.540		
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Lokasi Pengendalian OPT Pada Tanaman Kakao											1 lokasi 1 kegiatan	44.999.760	1 lokasi 1 kegiatan	44.999.760		
		Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Layanan [AUT] Jumlah Layanan [AUTP]											300 Ha 500 ha	68.999.780	300 Ha 500 ha	68.999.780		

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (permendagri 90)	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian												57,31%	444.145.300	58,5%	444.145.300	58,5%	888.290.600
Pengembangan prasarana pertanian														9.994.620		44.230.600		
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / CP2B	- Jumlah Sosialisasi LP2B yang dilaksanakan												5 kali	9.994.620	5 kali	5.000.000		
Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B	- Jumlah Pemetaan Yang dilaksanakan														1 dokumen	39.230.600		

Pembangunan Prasarana Pertanian														434.150.680		399.914.700		
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah JIT yang dibangun														10Paket	150.000.000		
Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan usaha tani.	Jumlah JIT yang dibangun											1 paket	199.914.700	7 paket		199.914.700		
Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Gedung RPHM yang di											1 paket	199.522.910			-		
Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan beserta sarana pendukungnya.	- Jumlah Gedung BPP yang di Rehab											1 unit	34.713.070	1 unit		50.000.000		

Meningkatnya Produksi Pertanian	Program Pemberdayaan penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase kelompok tani yg menerapkan anjuran teknologi budidaya pertanian	40,00%	164.092.429	40,00%	164.092.429	42,00%	114.735.100	45,00%	43.526.150,00	51,00%	202.428.000						60,00%	524.781.679
	1.Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	1. Jumlah temu teknis penyuluh tingkat kota	2 kali	164.092.429	164.092.429	164.092.429	2 kali	114.735.100	2 kali	43.526.150	4 kali	202.428.000						20 kali	360.689.250
		2. Jumlah training bulanan penyuluh di kecamatan	12 kali				12 kali	12 kali	12 kali		12 kali	12 kali	60 kali						
		3. Jumlah penilaian angka kredit penyuluh	38 orang				38 orang	38 orang	38 orang		38 orang	38 orang	114 orang						
		4. Jumlah evaluasi kinerja penyuluh THL-TB	26 orang				26 orang	26 orang	19 orang		19 orang	19 orang	19 orang						
		5. Jumlah dokumen programa penyuluhan yang disusun	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen						

		Program Penyuluhan Pertanian (permendagri 90)		Persentase kelompok tani yg menerapkan anjuran teknologi budidaya pertanian											55,00%	226.788.720	60,00%	226.788.720	108,00%	453.577.440
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian														226.788.720		226.788.720		
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah pelaksanaan kostrada Jumlah pelaksanaan kostratani Jumlah Training Penyuluh												1 kali 5 kali 8 kali	47.580.960	1 kali 5 kali 8 kali	47.580.960		
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok yang direvitalisasi Jumlah Pelaksanaan demplot Jumlah peserta panas												20 Kelompok 2 komoditi	50.058.280	20 Kelompok 2 komoditi 50 peserta	154.207.760		
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana Pendukung Kostratani di BPP												5 unit	129.149.480	5 unit	20.000.000		
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah SL yang dilaksanakan														5 Kecamatan	5.000.000		

	Meningkatnya Produksi Pertanian	Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak	Persentase angka kematian ternak	0,40%	333.359.400	0,40%	333.359.400	0,37%	273.709.029	0,36%	657.885.526	0,35%	639.959.469						1.904.913.424	
		1. Pendataan masalah peternakan	- Jumlah Dokumen statistik peternakan - Buku data depo obat hewan - Jumlah sampel untuk uji sebaran penyakit	3 dokumen	100.880.449	3 dokumen	100.880.449	1 dokumen	44.639.925	1 dokumen	12.004.000	1 dokumen, 1 buku, 200 sampel	120.000.000						176.649.925	
		2. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	- Jumlah pemberian vitamin pada ternak besar; - Jumlah pemeriksaan hewan qurban; - jumlah vaksinasi rabies	3.000 ekor	134.210.730	3.000 ekor	134.210.730	5 kecamatan	112.781.985	5 kecamatan	172.690.426	1000 ekor; 1700 ekor; 2000 ekor	189.959.469						475.431.880	
		3. Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik	Jumlah positive rabies pada hewan	3 ekor	79.661.950	3 ekor	79.661.950	5 kecamatan	49.891.600	5 kecamatan	63.776.600	3 ekor	120.000.000						233.668.200	
		4. Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	- Jumlah peserta sosialisasi juru sembelih halal (hewan qurban), '- Jumlah penerbitan SKKH	147 SKKH	18.606.271	147 SKKH	18.606.271	150 SKKH	66.395.519	100 orang; 150 SKKH	12.985.000	100 orang; 150 SKKH	70.000.000						149.380.519	
		5. Operasional UPTD Puskesmas	- Jumlah Pengadaan obat-obatan yang disediakan; Jumlah Honor THL yang dibayar	-	-	-	-	-	-	-	396.429.500	13 Item; 4 orang THL	140.000.000						536.429.500	
	Meningkatnya Produksi Pertanian	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi Sapi (ekor)	5620		5620		5732		5846		5962							9.017.121.548	
			Jumlah Produksi Sapi Konsumsi (ton)	939 kg	583.180.564	939 kg	583.180.564	967 kg	2.477.556.848	996 kg	4.991.534.296	1036 kg	964.849.840							
		1. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak yang dibangun	jumlah sarana dan prasarana pembibitan ternak yang dibangun	-	319.900.000	-	319.900.000	1 unit	1.842.060.500	2 unit	4.503.495.616	Pembangunan kandang dan kelengkapan	350.000.000							6.695.556.116
		2. Pembibitan dan perawatan ternak	jumlah semen beku yang diadakan untuk pembibitan dan perawatan ternak	100 dosis	48.508.454	100 dosis	48.508.454	700 dosis	43.361.000	2500 dosis	39.368.700	150 dosis	43.305.570							126.035.270
		3. Pembinaan dan Pengembangan Peternakan	Jumlah kelompok peternak penerima bantuan pemerintah yang dibina	20 ekor	214.772.110	20 ekor	214.772.110	15 kelompok	592.135.348	15 kelompok	19.585.700	15 kelompok	21.544.270							633.265.318
		4. Operasional BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak	Jumlah Populasi sapi yang dikelola	-	-	-	-	-	-	12 bulan	429.084.280	150 ekor sapi	550.000.000							979.084.280

Meningkatnya Produksi Pertanian	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Persentase Fasilitas pemasaran hasil produksi peternakan	29.00%	639.938.000	29.00%	639.938.000	30.00%	636.212.136	31.00%	952.337.978	32.00%	999.738.000						3.228.226.114
	1. Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	Jumlah sarana dan prasarana pasar temak yang dibangun	1 paket	85.870.000	1 paket	85.870.000	1 paket	117.885.000			3.650 ekor ; 160 orang	198.000.000						315.885.000
	2. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	Jumlah sarana dan prasarana pasar temak yang dipelihara	-	353.104.650	-	353.104.650	12 bulan	377.852.136	12 bulan	849.281.078	2 lokasi	565.738.000						1.792.871.214
	3. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Jumlah Kontes Temak yang diikuti	Populasi Sapi	1 kali	182.106.400	1 kali	182.106.400	1 kali	140.475.000	1 kali	103.056.900	1 kali	210.000.000					
4. Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah Jenis Pelatihan Pengalihan Daging RPHM Kota Pajajumbuh	Populasi Sapi	-	18.856.950	-	18.856.950					3 jenis	26.000.000						26.000.000

		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam daerah kabupaten/kota														178.585.904		178.585.904			
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan gangguan reproduksi Jumlah pelayanan kesehatan Jumlah peyanan SKKH dan SKSR													300 ekor 1500 ekor 250 dokumen	178.585.904	300 ekor 1500 ekor 250 dokumen	178.585.904		
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner															36.846.980		36.846.980		
		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah KIE penerapan pangan asuh Jumlah KR sistem informasi pengolahan hasil peternakan													20 unit 20 unit	20.970.180	20 unit 20 unit	20.970.180		
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan Pemotongan Ruminansia Produktif yang dilakukan													1 kegiatan	15.876.800	1 kegiatan	15.876.800		
		Urusan KELAUTAN DAN PERIKANAN															422.755.517		422.755.517		
	Meningkatnya Produksi Pertanian	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Ikan Konsumsi	482,25 ton	1.127.610.809	482,25 ton	1.127.610.809	500 ton	504.672.427	520 ton	579.507.804	540 ton	2.217.756.645						560 ton	4.429.547.685	
		1. Pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah pembangunan BBI (Lanjutan)	40%	735.798.159	40%	735.798.159	1 paket	174.384.500			1 paket	1.735.000.000						3 Paket	1.909.384.500	
		2. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Jumlah kelompok tani pembudidaya ikan yang didampingi	6 Pokdakan	39.824.400	6 Pokdakan	39.824.400	-	-	6 Pokdakan	113.768.350	6 Pokdakan	40.000.000						6 Pokdakan	153.768.350	
		3. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah petani yang mengikuti Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan	2 paket	128.504.250	2 paket	128.504.250	0	0	80 orang	50.964.450	80 orang	40.000.000						80 orang	90.964.450	

		4. Pengendalian hama dan penyakit ikan	Jumlah Pelatihan; Jumlah pengujian sampel ikan; Jumlah pengujian sampel air; Jumlah alat pengujian kualitas air.		1 kali, 40 sampel	37.493.950	1 kali, 40 sampel	37.493.950	1 kali, 40 Sampel	43.624.600	1 hari; 30 orang; 20 sampel; 1 paket	26.433.000	1 hari; 30 orang; 10 sampel; 1 paket	60.000.000				1 hari; 30 orang; 10 sampel; 1 paket	130.057.600					
		5. Optimalisasi sarana dan prasarana UPTD perbenihan dan pakan ikan	Jumlah sarana prasarana UPTD perbenihan dan pakan ikan yang tersedia		1 Paket	185.990.050	1 Paket	185.990.050	12 bulan	286.663.327	12 bulan	388.342.004	1 Paket	342.756.645				5 paket	1.017.761.976					
	Meningkatnya Produksi Pertanian	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan		persentase kelompok tani yang menerapkan anjuran teknologi budidaya perikanan	74,19%	53.139.250	74,19%	53.139.250	77,42%	181.459.000	80,65%	104.850.100	83,87%	393.593.760				0,00%	733.042.110					
		1. Penyuluhan GEMARIKAN	1. Jumlah pelatihan masak serba ikan		1 kali	53.139.250	1 kali	53.139.250	1 kali	181.459.000	1 kali	104.850.100	1 kali	393.593.760				5 kali	733.042.110					
	2. Jumlah Lomba Gemarikan Tingkat Kota			1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali											5 kali		
	3. Jumlah Lomba Gemarikan Tingkat Prov			1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali												5 kali	
	4. Jumlah Sosialisasi Gemarikan			3 kali	3 kali		3 kali		3 kali		3 kali												15 kali	
	5. Jumlah Pameran yang diikuti			1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali												5 kali	

		Program Pengabdian Perikanan Buddidaya (permendagri 90)	Persentase kelompok tani yg menerapkan anjuran teknologi budidaya perikanan												70%		72%		72%	
			Persentase kematian ikan												5%	402.755.637	5%	402.755.637	5%	805.511.274
			Jumlah Produksi ikan konsumsi												550 ton		560 ton		560 ton	
			Jumlah Angka konsumsi ikan												34 kg/kapita/thn		35 kg/kapita/thn		35 kg/kapita/thn	
		Pemberdayaan Pembudidayaan ikan kecil														34.999.900		34.999.900		
		Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Jumlah Lomba implementasi gemarikan pada kurikulum PAUD Jumlah Lomba implementasi gemarikan pada kurikulum PAUD tingkat Provinsi Jumlah Lomba Kinerja foran kelurahan tingkat provinsi Jumlah lomba masak sera ikan tingkat propinsi Jumlah Lomba masak sera ikan tingkat Provinsi Jumlah pelatihan masak sera ikan tingkat propinsi												10 PAUD 1 PAUD 1 kali 5 Kec 1 kelompok 5 kec	34.999.900	10 PAUD 1 PAUD 1 kali 5 Kec 1 kelompok 5 kec	34.999.900		
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan														367.755.737		367.755.737		
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam Satu Daerah Kota/Kabupaten	Jumlah sarana prasarana UPTD perbenihan dan pakan ikan yang tersedia												1 tahun	347.755.917	1 tahun	347.755.917		
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan bagi petugas Jumlah pelatihan bagi Pokdakan Jumlah pengujian sampel ikan Jumlah sampel pengujian kualitas air												1 kali 1 kali 10 sampel 10 Sampel	19.999.820	1 kali 1 kali 10 sampel 10 Sampel	19.999.820		

Meningkatnya Produksi Pertanian	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan		Jumlah fasilitasi pemasaran hasil perikanan	1 kali	33.287.650	1 kali	33.287.650	1 kali	51.966.500	1 kali	16.955.900	2 kali	100.000.000					9 kali	202.210.050
	Pengembangan pengolahan hasil perikanan	1. Jumlah pelatihan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	165 orang	165 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	150 orang										
		2. Jumlah Pelatihan pengemasan produk	-	33.287.650	-	33.287.650	30 orang	51.966.500	30 orang	16.955.900	30 orang	100.000.000	150 orang	202.210.050					
		3. Jumlah promosi hasil usaha perikanan	-	-	-	2 kali	2 kali	2 kali	10 kali										
		4. Jumlah Sistem informasi pasar	-	-	1 tahun	1 tahun	1 tahun	5 tahun											

		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (permendagri 90)	Jumlah fasilitasi pemasaran hasil perikanan											1 kali	19.999.880	2 kali	19.999.880	3 kali	39.999.760
		Pembinaan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran skala Mikro dan Kecil													19.999.880		19.999.880		
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah bazar produk olahan perikanan Jumlah pelatihan pengolahan hasil perikanan Jumlah sosialisasi mutu keamanan pangan hasil perikanan											1 kali 1 kali 1 kali	19.999.880	1 kali 1 kali 1 kali	19.999.880		
Jumlah					4.887.118.331,00	4.887.118.331,00	6.059.688.411,00	9.676.869.692,00	7.865.622.019						14.726.089.230		14.726.089.230		28.362.372.753

BAB VII.

KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan misi kedua RPJMD Kota Payakumbuh yaitu Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Bedaya Saing dan Berkeadilan Dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama dengan salah satu tujuan meningkatkan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani dalam rangka mencapai kedaulatan pangan maka disusun program dan kegiatan dalam rangka pencapaian misi daerah dan sekaligus dengan memperhatikan isu strategis yang berkembang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian.

Program dan kegiatan yang dilakukan merupakan merupakan tindak lanjut dari kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran untuk peningkatan produksi, produktivitas, kualitas dan peningkatan kesejahteraan pelaku utama sektor pertanian yang mencakup sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Penyusunan program dan kegiatan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan asset yang ada untuk meningkatkan hasil dari berbagai komoditi pertanian dan difokuskan pada komoditas unggulan dan komoditas strategis. Program dan kegiatan Dinas Pertanian juga mengacu pada indikator Kinerja Daerah pada tabel 7.1:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pertanian Yang Mengacu Pada Tujuan Sasaran RPJMD Kota Payakumbuh

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU/SPM)		Satuan	Kondisi Kinerja pada awal	Realisasi Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-			Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
								2017	2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Meningkatnya Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	1 Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1	Produksi Padi	ton	37,402	41,150	41,515	39,800	40,517	41,000	41,200	Penurunan sebesar 4,15 % dari 43000 ton menjadi 41200		
				2	Produksi Cabe	ton	973,9	606,00	892	897,6	985	900	905	Penurunan sebesar 8,9 % dari 990 ton menjadi 905		
				3	Produksi Bawang	ton	-	110	140	211,5	400	215	220	Penurunan sebesar 63 % dari 600 ton menjadi 220 ton		
				4	Produksi Kakao	ton	1,092	950,00	1045	3002,24	1,100	1,105	1,110	Penurunan sebesar 9,7 % dari 1230 ton menjadi 1110 ton		
			2	Meningkatnya Populasi Ternak	6	Populasi Sapi	Ekor	5,510	5707	5756	5849	5,962	5,992	6,025	Penurunan sebesar 2,8 % dari 6202 ekor menjadi 6025 ekor	
			3	Meningkatnya Produksi Perikanan	9	Produksi Ikan Konsumsi	Ton	433,27	485,74	501,65	520,11	540,00	550,00	560,00	100%	
			4	Meningkatnya kesejahteraan petani	10	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	100,32	100,44	100,73	98,95	100,73	100,15 %	100,22 %	Penurunan sebesar 0,7 % dari 101 % menjadi 100,22 %	
			5	Meningkatnya	11	Nilai AKIP				BB	BB	A	A	A	A	100%

Tabel 7.1.a
Indikator Kinerja Dinas Pertanian Yang Mengacu Pada Tujuan Sasaran RPJMD Kota Payakumbuh Setelah Perubahan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU/SPM)	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD 2016	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-						Ket
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	3	4			5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	1 Meningkatkan Produksi Pertanian	1 Persentase Pencapaian Target Produksi Pertanian (Fokus Pada 3 Komoditi Pertanian Produksi Ikan Konsumsi, Produksi Padi, Populasi Sapi)	%					100	100	100	IKU
			2 Meningkatkan AKIP Dinas Pertanian	2 Niai AKIP			BB	BB	A	A	A	A	IKU

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanian adalah :

URUSAN PERTANIAN TAHUN 2017-2020

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Dengan kegiatan :
 - Penyediaan jasa surat menyurat;
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
 - Penyediaan alat tulis kantor;
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - Penyediaan makan dan minum;
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - Penyediaan tenaga administrasi dan teknis perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan okhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen Pelayanan Publik.
5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah.
6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
 - Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian/Perkebunan.
7. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani;
 - Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis.
 - Peningkatan Insentif dan Disinsentif bagi petani/kelompok tani
8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
 - Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan;
 - Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan;
 - Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan;
 - Pengembangan pembenihan/pembibitan;
 - Monitoring evaluasi dan pelaporan
 - Gerakan Masal (Gemas) pemangkasan kakao;
 - Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman pertanian/perkebunan;
 - Pengembangan intensifikasi tanaman padi/palawija

9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/perkebunan tepat guna
 - Penyuluhan penerapan teknologi pertanian perkebunan tepat guna
 - Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
 - Peningkatan produksi dan mutu produk horti melalui gerakan mandiri hortikultura (Gema Horti)
10. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
 - Pendataan masalah peternakan;
 - Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak;
 - Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemic;
 - Pengawasan perdagangan ternak antar daerah;
11. Program peningkatan produksi hasil peternakan.
 - Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak;
 - Pembibitan dan perawatan ternak;
 - Pembinaan dan pengembangan peternak.
12. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
 - Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan;
 - Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan;
 - Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah;

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2017-2020

1. Program pengembangan budidaya perikanan
 - Pengembangan bibit ikan unggul;
 - Pembinaan dan pengembangan perikanan
 - Pengendalian hama dan penyakit ikan
 - Optimalisasi sarana dan prasarana UPTD perbenihan dan pakan ikan
2. Program pengembangan sistim penyuluhan perikanan
 - Penyuluhan GEMARIKAN
3. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
 - Pengembangan pengolahan hasil perikanan

URUSAN PERTANIAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021-2022 (Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
7. Program Penanggulangan Bencana Pertanian
8. Program Perizinan Usaha Pertanian
9. Program Penyuluhan Pertanian

BAB VIII. PENUTUP

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Payakumbuh memuat latar belakang, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh. Revisi Renstra ini berfungsi sebagai evaluasi terhadap capaian kinerja Dinas Pertanian dari tahun 2017-2019 dan sebagai acuan utama dalam penetapan target kinerja tahun 2021-2022. penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Payakumbuh setiap tahunnya.

Program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada peningkatan produksi pertanian/perikanan di Kota payakumbuh dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani khususnya dan masyarakat Kota Payakumbuh umumnya, serta pencapaian swasembada pangan nasional berkelanjutan. Pelaksanaan rencana kerja dalam bentuk program dan kegiatan akan berjalan baik dengan dukungan dan peran aktif semua pihak internal maupun eksternal. Faktor lain yang mempengaruhi pencapaian renstra ini adalah adanya sinergitas dengan program dan kegiatan pembangunan dengan tingkat nasional dan provinsi. Dengan adanya sinergi pelaksanaan kegiatan pembangunan maka pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator yang termuat dalam dokumen renstra ini diharapkan mampu tercapai seoptimal mungkin dengan adanya kerjasama dan dukungan dari semua stakeholder terkait baik stack holder pemerintah maupun swasta.

Disamping itu Rencana Strategis 2017-2022 menjadi dasar dan tolok ukur dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian serta penyusunan laporan kinerja tahunan (LAKJIP).

Payakumbuh, 27 Agustus 2021
Kepala Dinas Pertanian
Kota Payakumbuh



Ir. DEPI SASTRA
Nip 196502 199803 1 011